



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019



Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE
BUPATI DHARMASRAYA

Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
INSPEKTORAT

Jl. Lintas Sumatera KM. Pulau Punjung Telp. 0754-451440 Fax. 0754-451492
Website : //http.www.inspektorat.dharmasrayakab.go.id Email: Irda_Dharmasraya@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pulau Punjung, Maret 2020

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA

KANDAM, S. Sos
NIP. 19670607 199103 1 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Dharmasraya yaitu:

” **MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA**“, sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya jangka waktu 5 tahun periode 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya telah berhasil dalam melaksanakan kinerja, dengan adanya laporan ini diharapkan jadi bahan evaluasi agar kedepannya lebih terukur antara Aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan, Pelaksanaan, dan Evaluasi untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat Dharmasraya.

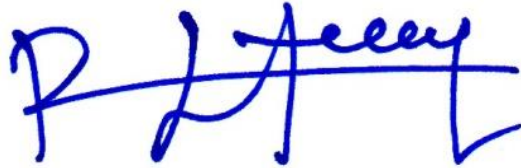
Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari partisipasi, kerjasama serta kerja keras semua pihak yakni masyarakat, dunia swasta dan



aparat pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhirnya atas kontribusi tersebut kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Pulau Punjung, Maret 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Riska'.

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE



IKHTISAR EKSKLUSIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Daerah untuk mendorong tatakelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi. Pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus memuat visi, misi Kepala Daerah, termasuk tujuan dan sasaran serta tolok ukur /Indikator kinerja Utama yang jelas dapat diukur, diuji dan diandalkan atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai guna perwujudan Visi **MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA** bermakna Hadirnya di Kabupaten Dharmasraya pada priode 2016-2021 yang memuat misi tugas :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan,perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.



Misi-misi tersebut diatas dalam LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang. Melalui langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas sebagai perangkat negara dalam pelaksanaan dan Revolusi mental Bangsa. Kemudian dari pada itu yang pasti masyarakat mendapatkan hasil dari Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri.



Surat Pernyataan telah di Reviu oleh APIP	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	V
Bab I PENDAHULUAN	
A. Dharmasraya Sekilas	1
B. Gambaran Penduduk Dharmasraya	2
C. Riwayat Kabupaten Dharmasraya	6
D. Permasalahan di Kabupaten Dharmasraya	8
E. Sistematika Penulisan	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi dan Misi	9
B. Perjanjian Kinerja dan Penganggaran	12
Bab III KINERJA Daerah	
A. Pengukuran Kinerja	15
B. Realisasi Anggaran	53
C. Efektifitas Sumber Daya Aparatur	58
D. Inovasi Daerah	59
Bab IV PENUTUP	60
Lampiran :	
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
Pengukuran Kinerja	
Penghargaan dan Piagam Penghargaan Tahun 2018 dan 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dharmasraya Sekilas

Dharmasraya adalah nama sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Letak geografis Kabupaten Dharmasraya 00048'25,4"- 1041'40,3" LS dan 10108'32,5"-101053'30,2" BT.. Luas wilayah berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 adalah 2.961,13 Km² (296.113 Ha). Sebesar 87,4% dari luas wilayahnya merupakan lahan pertanian, sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km² (302.599) Ha.

Dengan posisi sangat strategis berada di segitiga emas Sumbar, Riau dan Jambi, persisnya di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan batas sebelah barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 wilayah administrasi Kecamatan dan 52 Nagari atau pemerintahan setingkat Desa. Selain itu Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut Pemkab membentuk 18 dinas daerah, 3 (tiga) badan dan 1 (Satu) kantor. Dengan komposisi tersebut diharapkan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik.

Dilingkungan legislatif, ada 30 anggota DPRD yang berasal dari 10 partai politik. Sebagian dari anggota legislatif telah duduk sebagai anggota DPRD dalam beberapa periode. Dan juga sebagian besar anggota DPRD adalah berpendidikan sarjana. Dengan demikian, kualitas legislatif dianggap cukup mumpuni untuk bekerjasama dengan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan cita cita pembangunan.



Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemkab Dharmasraya memiliki 3.632 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah, baik sebagai pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pelaksana. Dilihat dari golongannya, sebagian besar ASN yang ada merupakan pegawai golongan III dengan pendidikan sarjana. Ini berarti, secara umum ASN di Kabupaten Dharmasraya memiliki kemampuan cukup untuk mengemban tugas di lingkungan masing masing

Dari segi Pendidikan, sebanyak 2431 orang atau 66,93% dari seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Dharmasraya merupakan lulusan pendidikan strata I, 677 orang dengan jenjang pendidikan diploma, dan hanya 0,27 % yang berasal dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar



ASN Golongan I&II : 560 Orang



ASN Golongan III : 2.374 Orang



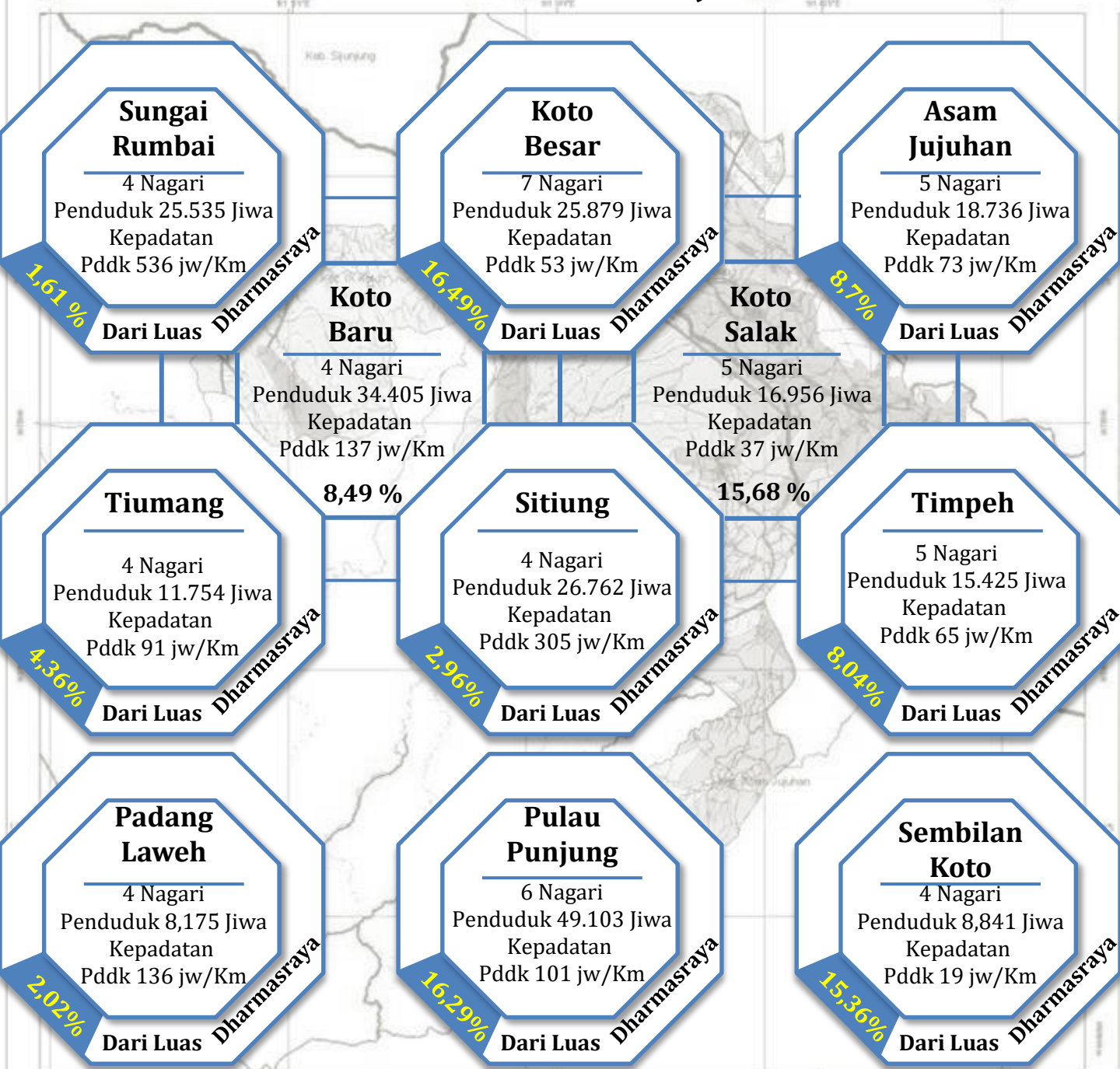
ASN Golongan IV : 699 Orang

B. Gambaran Penduduk Dharmasraya

Sebagian besar wilayah Kabupaten Dharammasraya telah dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian, mulai tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang mencapai 87,74 persen dari total luas wilayah.

Pemanfaatan lahan untuk pengembangan usaha ini telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian. Dengan memanfaatkan lahan, khususnya untuk pengembangan sektor pertanian secara luas, maka kebutuhan pangan dan papan masyarakat telah terpenuhi. Selain itu, usaha pertanian yang dilakukan juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di daerah ini. Dengan membaiknya pendapatan, maka masyarakat dapat mengakses pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya dengan lebih baik. Ini terlihat dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Dharmasraya Tahun sebesar 70,86.

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: BPS Dharmasraya;2020

Kabupaten Dharmasraya dihuni oleh 241.571 jiwa penduduk, terdiri dari penduduk laki-laki 116.293 jiwa dan penduduk perempuan 125.278 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dengan sex ratio 1,55. sementara jumlah penduduk terbanyak adalah pada usia produktif yaitu usia 25-29 tahun dan juga usia Balita. Sedangkan untuk kepadatan penduduk, Kecamatan Sungai Rumbai dimana setiap kilometer wilayahnya dihuni oleh 536 jiwa. Dengan komposisi demikian, jumlah angkatan kerja dan jumlah kebutuhan lapangan kerja menjadi permasalahan utama dalam sosial ekonomi masyarakat.

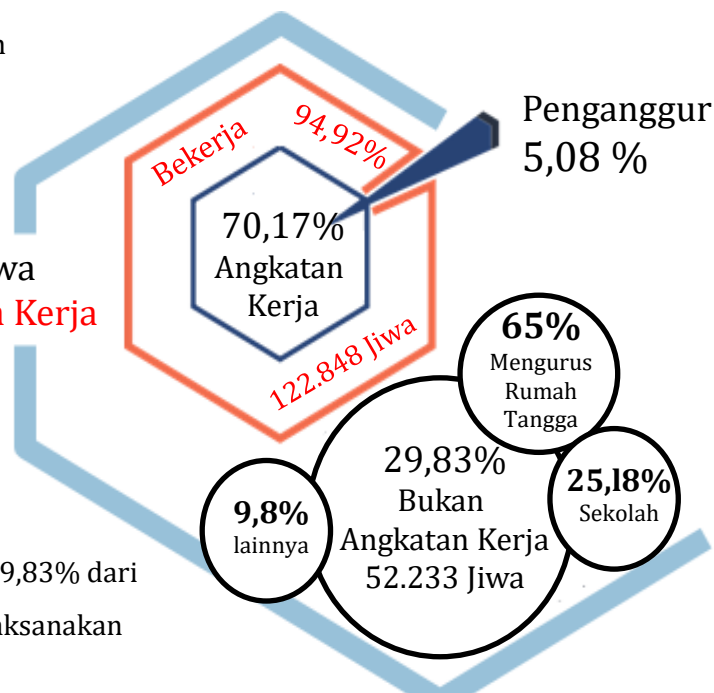
Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, air minum, protein dan energi juga terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya, angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah serta usia harapan hidup terus meningkat.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten

Dharmasraya sebagian besar adalah bertani, kemudian disusul sektor jasa (perdagangan, perhotelan, restoran), industri pengolahan, jasa servis dan lain lain.

Dari jumlah penduduk, 70,17 persen di antaranya merupakan angkatan kerja produktif. Dari jumlah angkatan kerja produktif, hanya 5,08 persen yang tidak bekerja alias menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja hanya 29,83% dari Total penduduk usia bekerja, dan sebagian besar melaksanakan Mengurus rumah tangga

175.081 Jiwa
Penduduk Usia Kerja



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat Agustus 2019

Perekonomian Daerah

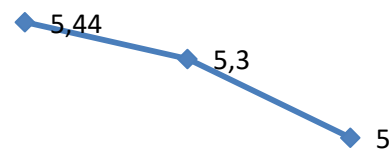
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Ini sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar dalam PDRB, disusul sektor jasa dan sektor perdagangan.

Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Berdasarkan PDRB per Kapita, Laju ekonomi di Kabupaten Dharmasraya mengalami Penurunan dalam kurun 3 tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian Lebih bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dharmasraya.

Jika kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat Dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Dibanding rata rata tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya lebih rendah. Ini menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumberdaya alam sudah semakin baik serta situasi dan kondisi untuk mengembangkan usaha juga semakin kondusif.

Bahkan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional, angka kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Sudah melampaui angka kemiskinan Nasional

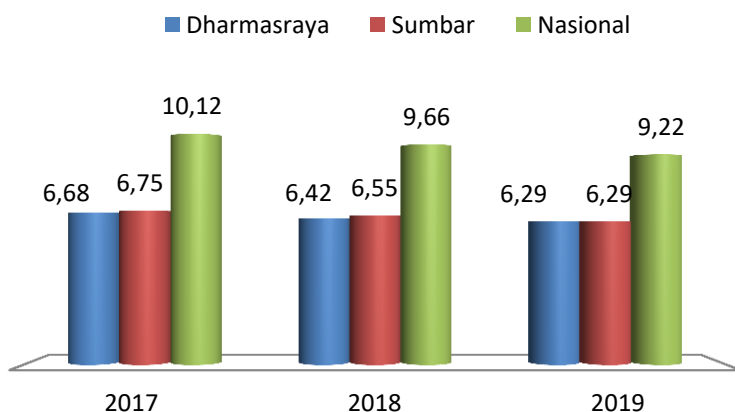
Pertumbuhan Ekonomi Dharmasraya Tahun 2017-2019



2017 2018 2019

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat,

Angka Kemiskinan Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2019



Kabupaten Dharmasraya secara sosial budaya terdapat sejumlah etnis, seperti Jawa, Sunda, Batak, dan tentu saja Minangkabau yang paling dominan. Dengan multi etnis tersebut, Pemkab Dharmasraya berupaya membangun identitas ke-Dharmasraya-an yang berakar dari etnis yang ada. Akulturasi dan amalgamasi dibangun secara alamiah dengan membaurkan etnis-etnis yang ada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan dan juga dengan mendorong pelaksanaan berbagai event budaya, sehingga trend kebudayaan baru hasil akulturasi dan amalgamasi ini akan menjadi identitas baru yakni Dharmasraya.

Salah satu upaya Pemkab Dharmasraya untuk membangun identitas kabupaten adalah dengan pelaksanaan Festival Pamalayu. Kegiatan tersebut mengangkat sebuah peristiwa ekspedisi pada abad ke-XIII masehi, dimana Raja Kertanegara dari Singhasari mengutus delegasi ke Kerajaan Swarnabhumi dengan mengirimkan sebuah arca perdamaian yang dikenal dengan arca Amoghapasa. Ekspedisi ini dikenal sebagai sebuah ekspedisi damai dan kelak hasilnya menjadi bagian dari upaya menyatukan nusantara.

Dalam prasasti yang dipahatkan di alas arca Amoghapasa, terungkap bahwa di Kabupaten Dharmasraya pernah ada sebuah pusat kerajaan bernama kerajaan Swarnabhumi, yang merupakan kerajaan melayu kuno.

Saat ini banyak peninggalan sejarah masa silam yang patut untuk digali dan diterjemahkan, nilai luhur apa yang terkandung di dalamnya. Inilah yang akan menjadi identitas Dharmasraya, sebagai salah satu daerah yang pernah memiliki peran besar dalam membangun nusantara di masa lalu.



C. Riwayat Kabupaten Dharmasraya



Sebelum dimekarkan, Kabupaten Dharmasraya merupakan bahagian dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Pada saat itu ada 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Sungai Rumbai. Program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah pusat pada tahun 1977, berhasil dengan baik. Keberhasilan program transmigrasi tersebut membawa dampak terhadap pembauran antara masyarakat transmigran dengan masyarakat setempat, peningkatan perekonomian masyarakat dan mendorong perkembangan wilayah.

Perkembangan wilayah dan juga masyarakat menjadikan adanya tuntutan pelayanan yang memadai. Tuntutan ini kemudian dijawab dengan dimekarkannya Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, maka Pemerintah resmi membentuk Kabupaten Dharmasraya,. Pada tanggal 7 Januari 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan kabupaten Pemekaran di Istana Negara, termasuk Kabupaten Dharmasraya

Aktifitas pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara riil baru dilakukan setelah dilantiknya Pejabat Bupati pertama pada tanggal 10 Januari 2004. Saat itu, penjabat Bupati pertama Drs, H. Ahmad Munawar, MM memulai pemerintahan dengan merekrut sejumlah personil dan juga menyiapkan perkantoran, terutama kantor bupati. Untuk pertama kali personil direkrut dari kabupaten induk yang bersedia pindah ke Dharmasraya dan para pegawai yang bertugas di kabupaten baru.

Berdasarkan panduan dari Kementerian Dalam Negeri, Penjabat Bupati Ahmad Munawar memberlakukan SOTK khusus kabupaten pemekaran dengan mengisi SOTK dengan personil yang ada. Mandat yang diberikan oleh penjabat bupati, selain menyiapkan struktur organisasi pemerintahan, juga membentuk DPRD dan menyiapkan pemilihan kepala daerah. Pembentukan DPRD dilakukan dengan melaksanakan konversi suara dari daerah pemilihan (Dapil) wilayah Kabupaten sesuai dengan tatacara konversi suara menjadi kursi dan jumlah anggota DPRD. Pada saat itu, jumlah anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya 25 orang.

Penjabat Bupati H. Ahmad Munawar tidak bisa melanjutkan tugasnya. Yang bersangkutan wafat tiga bulan setelah dilantik dan digantikan oleh Drs. Asrul Syukur yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung. Asrul merupakan pamong senior yang telah malang melintang bertugas di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, termasuk yang kemudian menjadi Kabupaten Dharmasraya.



Bupati I Kabupaten Dharmasraya
Bpk. H. Marlon Martua Situmeang, S.E



Bupati 2 Kabupaten Dharmasraya
Bpk. Ir. H. Adi Gunawan, M.M



Bupati 3 Kabupaten Dharmasraya
Bpk. Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E

Di tangan Asrul Syukur pemilihan bupati disiapkan. Namun kemudian dieksekusi oleh Drs. Bakri. Asrul Syukur sendiri kemudian ikut berkompetisi dalam pemilihan bupati Dharmasraya, sehingga harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Penjabat Bupati Dharmasraya dan digantikan oleh Drs. Bakri yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya. Bakri dengan gemilang mengantarkan Kabupaten Dharmasraya memilih bupati definitif pertama.

Pada tahun 2005, terpilih Bupati Dharmasraya devinitif pertama periode 2005-2010, yaitu H. Marlon Martua, SE sebagai Bupati dan Ir. Tugimin sebagai Wakil Bupati. Pasangan itu membawa visi “Mewujudkan Kabupaten Dharmasraya yang Maju Dalam Keseimbangan”.

Kemudian pada periode 2010-2015 bupati dan wakil bupati Dharmasraya dijabat oleh Ir. H. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin. R. pasangan itu membawa visi “Terwujudnya masyarakat Dharmasraya yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, adil dan sejahtera pada tahun 2015”.

Selanjutnya Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE dan Wakil Bupati H. Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos. Kedua pemimpin muda ini membawa visi “Menuju Kabupaten Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”

Dalam usia kabupaten yang sudah mencapai 16 tahun, Kabupaten Dharmasraya lepas dari daerah terpencil, perekonomiannya terus meningkat, pemerintahannya semakin mantap dan juga telah meraih prestasi di berbagai even, baik regional maupun nasional.



D. PERMASALAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya masih di bawah angka Provinsi dan Nasional
2. PDRB perkapita masih di bawah angka nasional
3. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih dibawah Provinsi dan Nasional
4. Jalan dalam Kondisi mantap belum memadai
5. Belum seluruh masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi dan air minum yang layak
6. Masih adanya rumah tidak layak huni
7. Masih adanya pemukiman kumuh
8. Tingginya tingkat pencemaran air di Kabupaten Dharmasraya terutama sepanjang aliran sungai batang hari
9. Penurunan kualitas (degradasi) lahan sehingga meningkatnya lahan kritis
10. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Dharmasraya masih di atas angka Provinsi Sumatera Barat
11. Banyaknya koperasi tidak aktif yang merupakan koperasi dari saat Kabupaten Dharmasraya belum dimekarkan

E.SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I – PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

menjelaskan capaian kinerja organisasi, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah serta realisasi anggaran tahun yang bersangkutan.

BAB IV – PENUTUP

menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



AMRIZAL DATUAK RAJO MEDAN, S.Sos
Wakil Bupati Dharmasraya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021, maka tahun 2019 ini merupakan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah di tahun keempat. Ini berarti, kondisi lingkungan strategis yang digunakan dalam perencanaan kinerja adalah gambaran dari separoh perjalanan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

Adapun visi yang ingin dicapai dalam lima tahun periode RPJMD adalah **“Menuju Dharmasraya yang Mandiri dan Berbudaya”**. Dalam visi tersebut ada dua kata kunci, yaitu Mandiri dan Berbudaya. Mandiri dapat digambarkan bahwa ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal, dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi keluarga serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.

Selain itu mandiri juga dapat digambarkan sebagai makin besarnya peranan masyarakat dalam pengelolaan hasil pertanian, jaringan distribusi dan pemasaran. Dan juga berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah, karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitarnya.

Berbudaya dapat digambarkan semakin cerdas, terdidik dan terampilnya anak negeri dan kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural, yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

Dari Visi Menuju Dharmasraya yang mandiri dan berbudaya, lahirlah 7 misi untuk mencapai visi tersebut, dari 7 misi dijabarkan kembali menjadi 8 tujuan dengan 15 sasaran, dari ke 15 sasaran tersebut, didapatkan 27 indikator sasaran yang akan dijabarkan didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran ini telah tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021, dan merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah untuk menghasilkan kinerja yang berorientasi hasil dengan efektif dan efisien

1

MISI

2

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.

Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.

Tujuan

Peningkatan kawasan pemukiman yang layak huni

Tujuan

Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia

Indikator Tujuan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan

Meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap

Indikator Tujuan

% Nagari yang terkoneksi dengan jalan mantap)

Indikator Tujuan

- Rasio Rumah Layak Huni
- Akses air minum layak
- Akses sanitasi layak

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran
Angka Harapan Hidup

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Indikator Sasaran
- Angka rata-rata lama sekolah
- Harapan lama sekolah

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan

Indikator Sasaran
Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator Sasaran
persentase Ketersediaan Kalori dan Protein per kapita

Indikator Sasaran
Rasio Rumah Layak Huni

Meningkatnya kualitas perumahan

Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak

Indikator Sasaran
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Sasaran
- Akses Air Minum Layak
- Akses Sanitasi yang layak

Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak

3

MISI

4

Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar

Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan

Menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Tujuan

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Tujuan

- Pertumbuhan PDRB
- PDRB per Kapita
- Gini Ratio

Indikator Tujuan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Meningkatnya Daya Saing Dunia Usaha dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Meningkatnya Status Mutu Air, Udara dan tutupan lahan

Indikator Sasaran
- Indeks kualitas air
- Indeks kualitas udara
- Indeks tutupan lahan

Indikator Sasaran
- Jumlah Koperasi Sehat
- Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas
- % IKM dg peningkatan Omset
- % Pasar dalam kondisi baik

Indikator Sasaran
Persentase Penduduk Miskin

Indikator Sasaran
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

5

MISI

7

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.

6

Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

Tujuan

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah

Indikator Tujuan

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)

Meningkatnya efektif & efisiensi pelaksanaan pembangunan

Indikator Sasaran

- %Capaian RPJMD
- Opini BPK terhadap laporan keuangan

Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintahan

Indikator Sasaran

- Hasil evaluasi AKIP
- Nilai LPPD

Tujuan

pembangunan berbasis nagari

Indikator Tujuan

persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal

Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintahan

Indikator Sasaran
persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal

Tujuan

Pengelolaan khazanah dan warisan budaya serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya

Indikator Tujuan

Jumlah cagar budaya yang ditetapkan

Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah

Indikator Sasaran

- Jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan
- Persentase Lembaga Adat Yang Akti
- Jumlah cagar budaya yang ditetapkan

Untuk memudahkan pemahaman, maka penyajian sasaran pembangunan tersebut dikelompokkan dalam empat bidang, yaitu :

1. Bidang Sumberdaya Manusia,

Sasaran yang mengacu kepada kepentingan sumber daya manusia, atau secara langsung menyangkut kepada masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan maupun kesetaraan gender.

2. Bidang Ekonomi,

seluruh sasaran yang berkaitan dengan tingkat perekonomian masyarakat. Serta kualitas hidup masyarakat dalam menjalani kehidupannya

3. Bidang Sosial Budaya

bidang ini berfokus kepada pemerintahan pembangunan nagari, serta kebudayaan

4. Bidang Lingkungan Hidup.

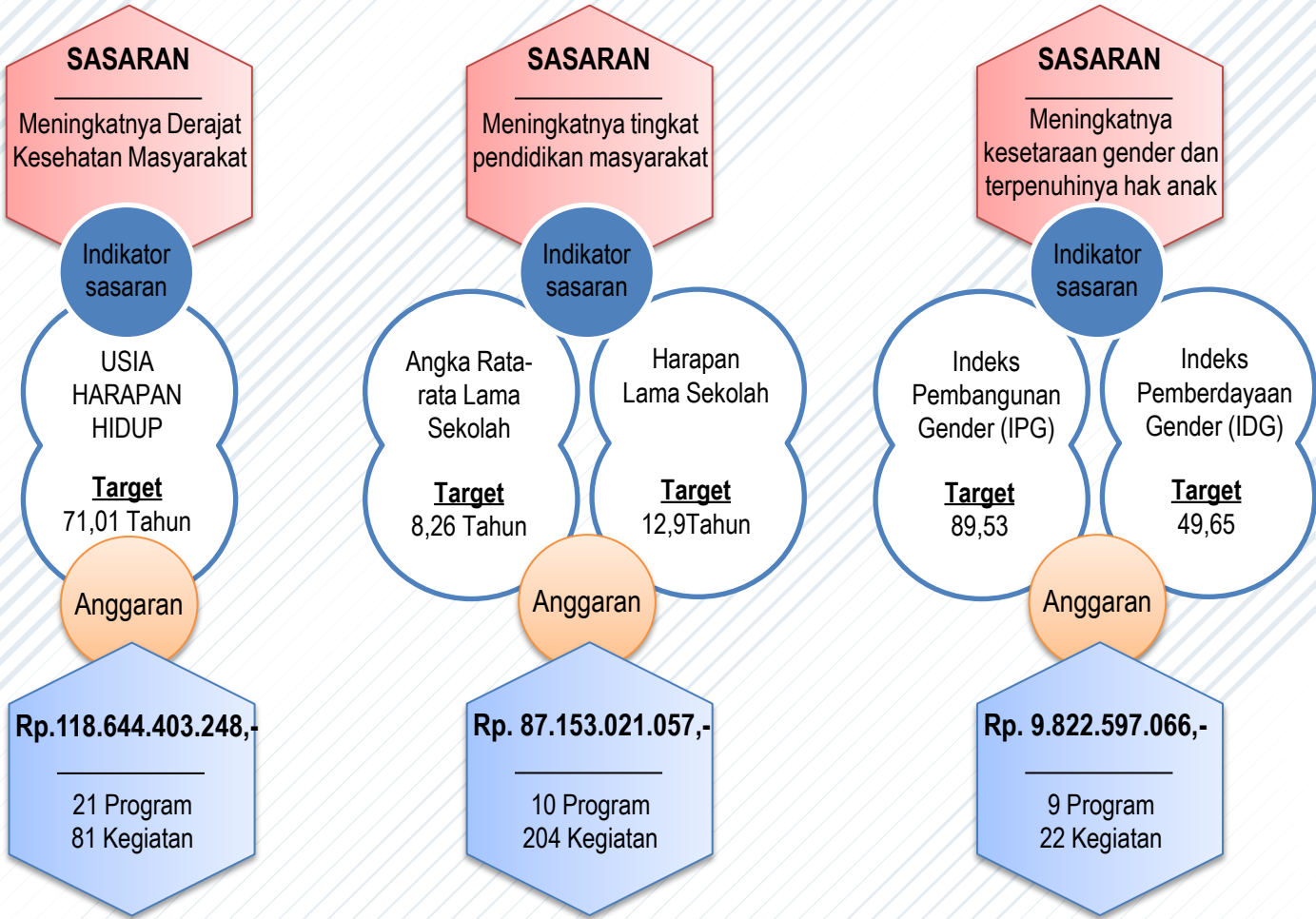
Bidang ini membahas sasaran tentang kualitas lingkungan hidup di Kabupaten dharmasraya



B. Perjanjian Kinerja dan Penganggaran

sebelum memulai tahun anggaran, kepala daerah membuat komitmen tentang apa yang akan dilakukan untuk mengisi pembangunan di tahun berikutnya. Komitmen tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja kepala daerah sebagai pedoman semua perangkat daerah dalam penyusunan kinerja tahun berikutnya. Adapun perjanjian kinerja Bupati Dharmasraya tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2019



PERJANJIAN KINERJA BIDANG EKONOMI TAHUN 2019

SASARAN

Meningkatnya
Ketahanan
Pangan

Indikator

% Ketersediaan
Kalori dan Protein
per Kapita

Target
78,85%

Anggaran

Rp.2.415.334.698,-
5 Program
14 Kegiatan

SASARAN

Meningkatnya
kualitas dan
aksesibilitas jalan

Indikator

Proporsi panjang
jaringan jalan
dalam kondisi
mantap

Target
78,85%

Anggaran

Rp. 64.191.195.061 ,-
9 Program
24 Kegiatan

SASARAN

Meningkatnya
kualitas
perumahan

Indikator

Rasio Rumah
Layak Huni

Target
78,85%

Anggaran

Rp. 12.666.700.000 ,-
9 Program
14 Kegiatan

SASARAN

Meningkatnya
akses terhadap air
minum dan
sanitasi layak

Indikator

Akses air minum
layak

Target
22,71%

Anggaran

Rp. 10.875.873.344 ,-
2 Program
6 Kegiatan

Indikator

Akses sanitasi
layak

Target
40,62%

SASARAN

Menurunnya
Tingkat
Kemiskinan

Indikator

% Penduduk
Miskin

Target
6,17%

Anggaran

Rp. 987.988.150 ,-
4 Program
13 Kegiatan

SASARAN

Meningkatnya
kontribusi sector
pertanian terhadap
PDRB

Indikator

% Kontribusi
sector pertanian
terhadap PDRB

Target
29,25%

Anggaran

Rp. 10.723.677.950 ,-
8 Program
33 Kegiatan

SASARAN

Meningkatnya daya saing usaha dunia usaha
dan kelembagaan ekonomi Masyarakat

Indikator

Jumlah
Koperasi
Sehat

Target
78,85%

Indikator

Pelaku Usaha
Mikro Naik
Kelas

Target
78,85%

Indikator

% IKM dg
peningkatan
omset

Target
78,85%

Indikator

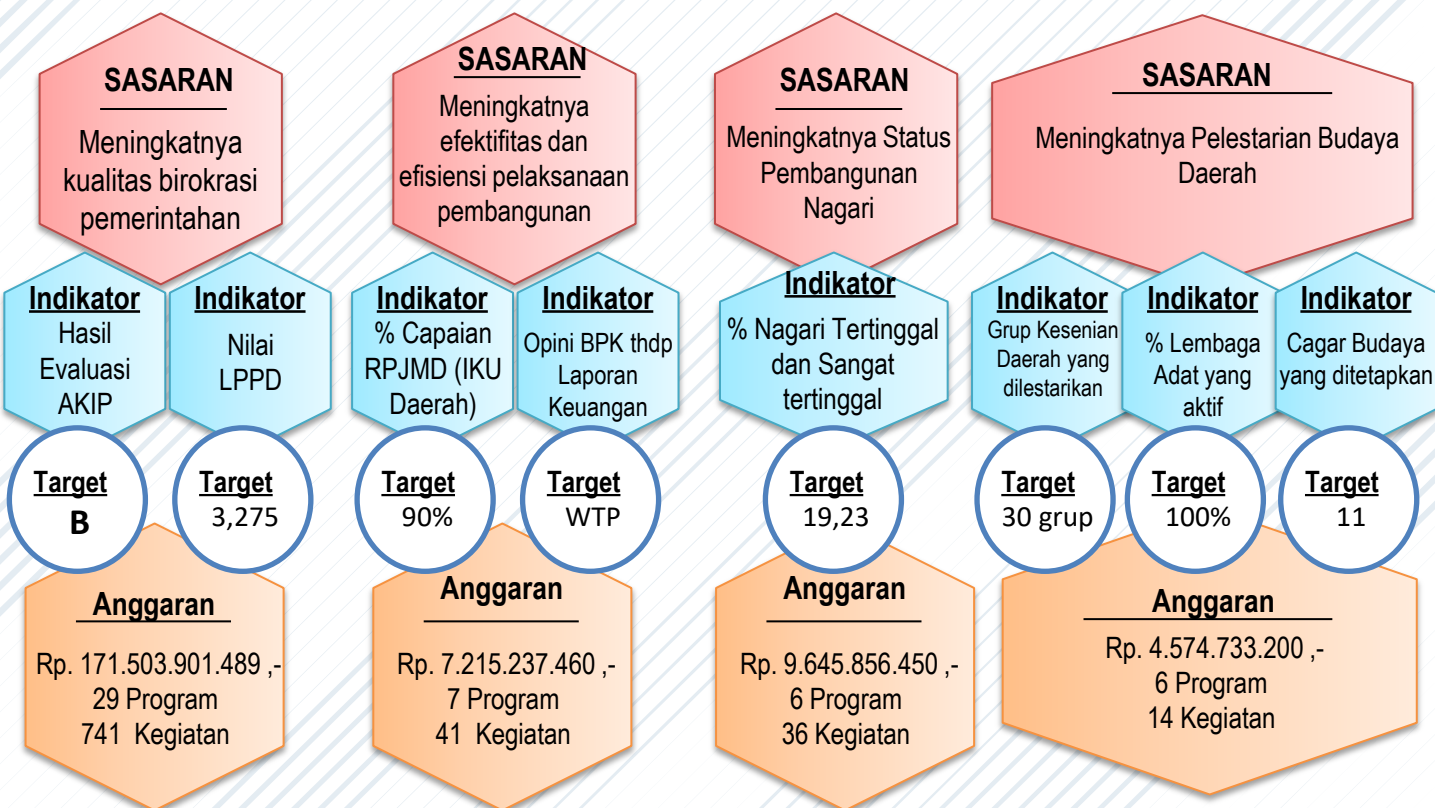
% Pasar dalam
Kondisi Baik

Target
6,17%

Anggaran

Rp. 10.723.677.950 ,-
8 Program
14 Kegiatan

PERJANJIAN KINERJA BIDANG SOSIAL BUDAYA TAHUN 2019



PERJANJIAN KINERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A

kuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan 15 sasaran strategis dengan 27 indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan capaian kinerja pemerintah daerah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja	Prediket Kinerja
1	> 85	Sangat Berhasil
2	$70 < X \leq 85$	Berhasil
3	$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
4	< 55	Tidak Berhasil

Dalam rangka penyampaian laporan yang komunikatif, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengelompokkan sasaran tersebut menjadi 4 Bidang yaitu; Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Budaya, dan Bidang Lingkungan Hidup. Adapun capaian kinerja tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut;

1. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA



SUMBERDAYA MANUSIA



Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa bidang Sumber Daya Manusia ditetapkan 3 sasaran dengan 5 indikator, dari 3 Sasaran yang menjadi fokus bidang Sumber Daya Manusia, seluruhnya mencapai prediket sangat berhasil dengan nilai mean 92,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Dharmasraya,.

A. SASARAN MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

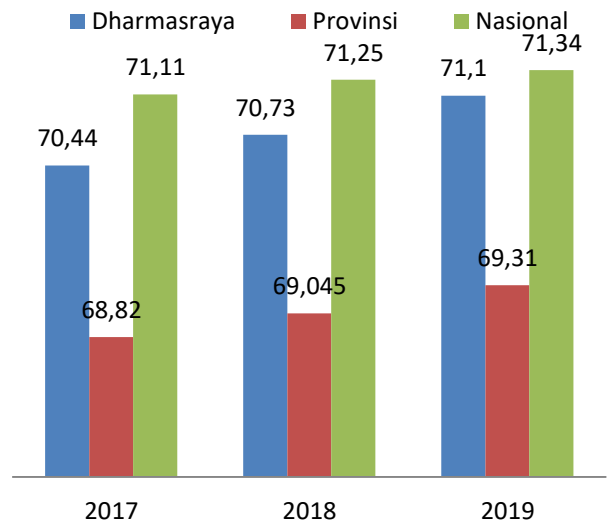
INDIKATOR USIA HARAPAN HIDUP



Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator angka harapan hidup atau usia harapan hidup. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 71,01 tahun bisa dicapai 71,1 tahun. Ini berarti capaian sebesar 100,13 persen dari target yang ditetapkan. Capaian nilai mean **92,5** dengan katagori **sangat berhasil**.

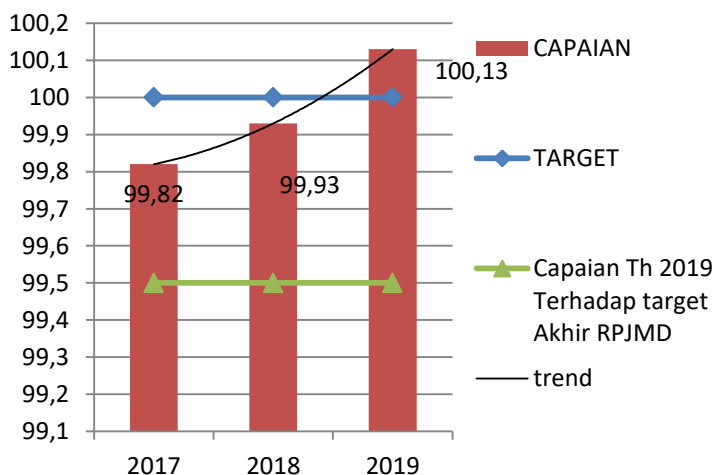
Dibandingkan dengan keadaan Provinsi capaian Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan usia harapan hidup masyarakat melampaui rata rata usia harapan hidup provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yaitu sebesar 69,31 tahun. Jika dibandingkan dengan usia harapan hidup nasional, capaian Kabupaten Dharmasraya masih dibawah capaian nasional dimana angka harapan hidup secara nasional adalah 71,34 tahun

Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Dharmasraya, Provinsi dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Dharmasraya; 2020

Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2017-2019



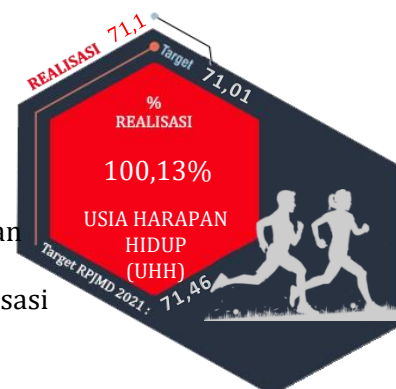
Jika dilihat dari capaian berdasarkan target yang ditetapkan, capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan usia harapan hidup masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika dibandingkan capaian tahun 2019 dengan target yang

ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021,

Capaian usia harapan

Hidup sudah terealisasi

sebesar 100,13%.

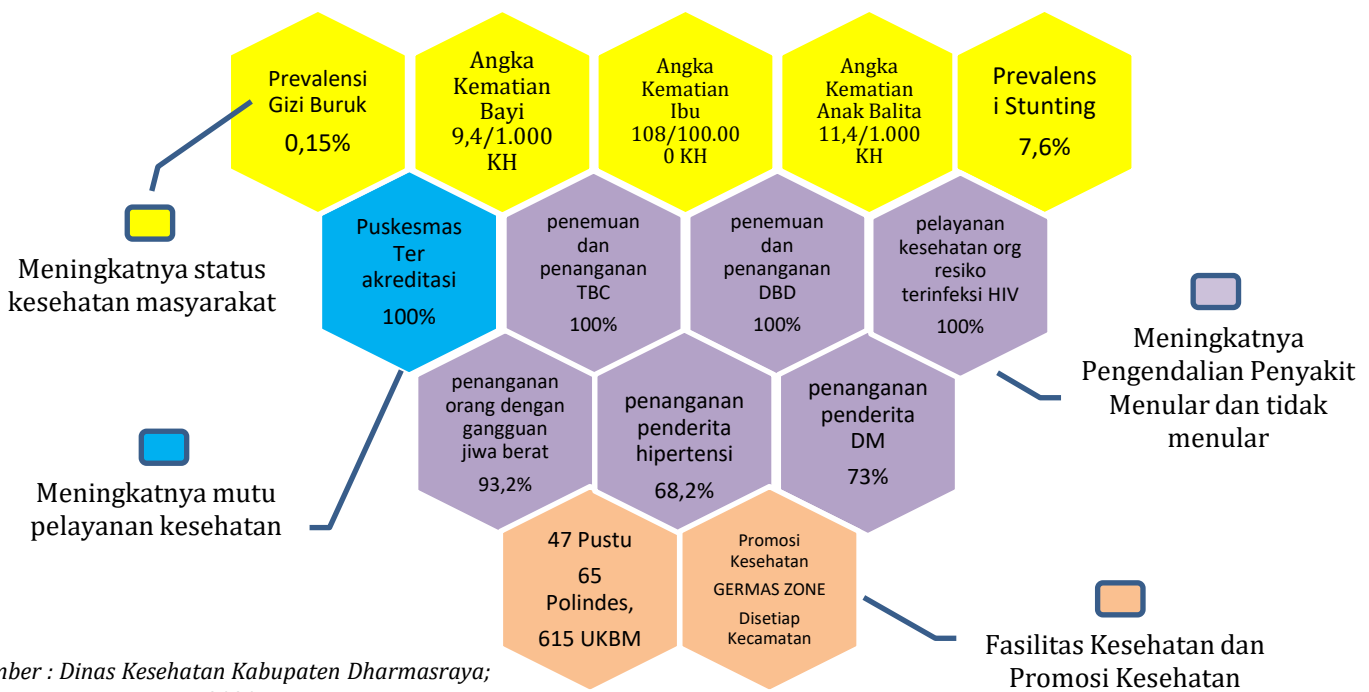


Sumber: BPS Dharmasraya; 2020

Capaian tersebut terealisasi berkat ada upaya Pemerintah untuk mendorong pelaksanaan pola hidup sehat secara masif. Pemasyarakatan pola hidup sehat ini dilakukan melalui kegiatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

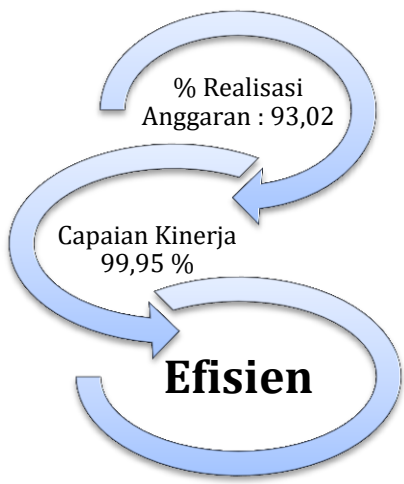
Setiap bulan dilaksanakan Germas di ibukota kecamatan dan selalu dipergilirkan, agar bisa menjangkau masyarakat di seluruh kabupaten. Selain melalui Germas, Pemkab Dharmasraya juga mengintensifkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan rumah sakit. Peningkatan layanan kesehatan ini dilakukan dengan cara melengkapi peralatan kesehatan yang lebih moderen, peningkatan biaya operasional layanan kesehatan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan petugas kesehatan, petugas medis dan paramedis. Bahkan untuk mencapai standar layanan kesehatan yang baik, semua unit layanan kesehatan sudah distandardisasi.

Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya; 2020

Keberhasilan pencapaian meningkatnya usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 21 Program dan 81 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 118.644.403.248



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 118.644.403.248,- terealisasi Rp.110.373.750.221,- (93,092 persen). Sementara capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 99,95 persen atau dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat efisien.

B. SASARAN MENINGKATNYA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

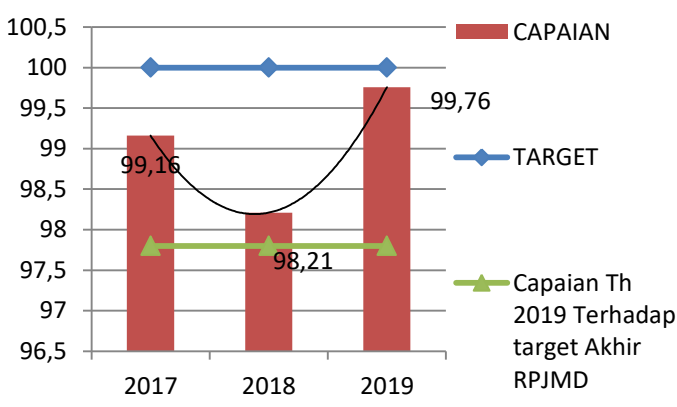


Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat diukur dengan dua indikator, yaitu angka rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Untuk indikator angkat rata-rata sekolah ditarget 8,48 tahun. Berhasil direalisasikan 8,26 persen, dengan capaian 97,41. Untuk indikator harapan lama sekolahditetapkan 12,9 tahun terealisasi 12,42 tahun dengan capaian 98,02 persen. Dengan mean dalam sasaran ini sebesar **92,5** maka capaian dari sasaran di atas dikategorikan **sangat berhasil**.

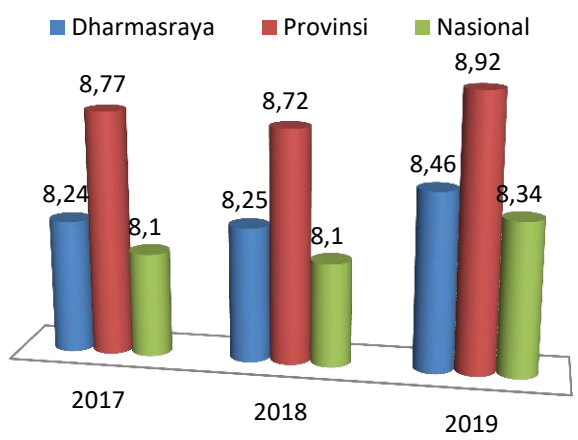
INDIKATOR ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Angka rata rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 ditarget 8,48 tahun. Berhasil direalisasikan 8,46 persen, dengan capaian 99,76% dengan kategori sangat berhasil, bahkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021, capaian angka lama sekolah sudah mencapai 97,8% dari target akhir RPJMD. Jika dilihat dari pencapaian selama 3 tahun terakhir, pencapaian kinerja angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan ditahun 2019.

Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2019

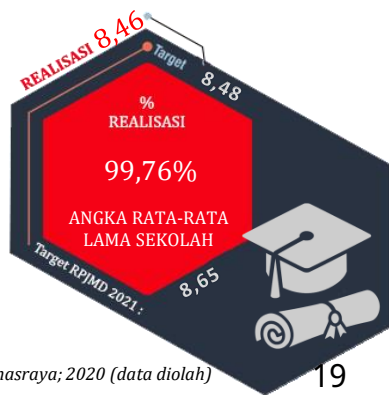


Perbandingan Capaian Angka Lama Sekolah Dharmasraya, Provinsi dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Dharmasraya; 2020

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, namun angka lama sekolah ini sudah hampir melampaui pencapaian nasional yaitu sebesar 8,34 tahun.

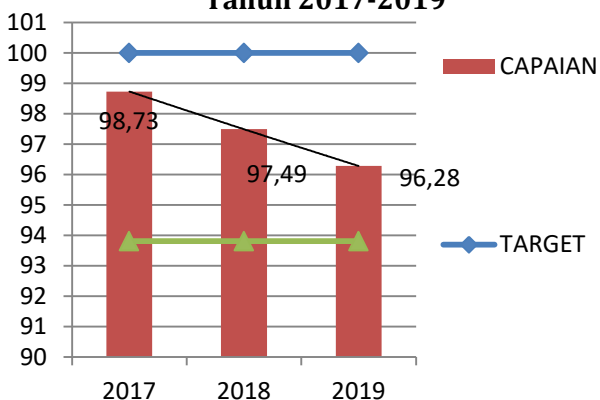


Sumber: BPS Dharmasraya; 2020 (data diolah)

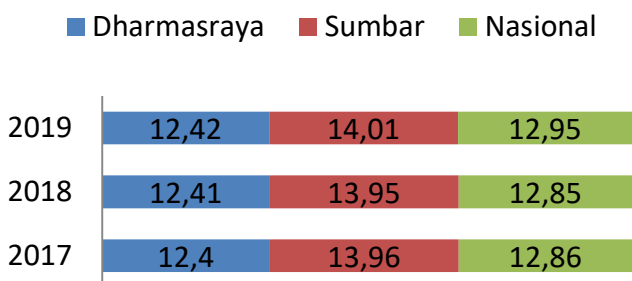
INDIKATOR HARAPAN LAMA SEKOLAH

Penghitungan Angka harapan lama sekolah bertujuan untuk mengetahui harapan anak-anak usia tertentu untuk bersekolah. Indikator tersebut menggambarkan mengenai kualitas lembaga pendidikan yang dikaitkan dengan kemungkinan anak-anak usia tertentu dapat menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Dengan demikian, kualitas lembaga pendidikan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari seberapa lama anak usia sekolah bisa mengenyam pendidikan.

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2019



Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dharmasraya dibanding Angka Provinsi dan Nasional



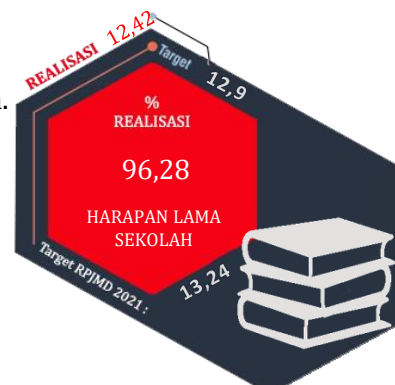
Sumber: Badan Pusat Statistik Dharmasraya; 2020

Besarnya capaian sasaran Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ini tidak lepas dari adanya upaya Pemkab Dharmasraya dalam peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Dalam setahun terakhir ini, Pemkab Dharmasraya melakukan upaya peningkatan manajemen Sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain dengan mengupayakan pembangunan sekolah baru, melaksanakan pembinaan terhadap profesionalisme guru, menyelenggarakan sekolah percontohan, melengkapi fasilitas sekolah dengan laboratorium, penambahan bahan bacaan perpustakaan sekolah dan bahkan usaha kesehatan sekolah.

Selain itu, Pemkab Dharmasraya melaksanakan sosialisasi masif untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan para orang tua, agar dapat mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar dan juga pendidikan usia dini (PAUD). Pemkab Dharmasraya terus mendorong penduduk usia sekolah untuk bersekolah, termasuk melalui pendidikan kejar paket A dan paket B. Bahkan serta menyekolahkan anak-anak dari suku anak dalam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, angka harapan lama sekolah yang berhasil dicapai Kabupaten Dharmasraya adalah 12,42 tahun dari target 12,9 tahun. Ini berarti capaian angka harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya sangat berhasil (96,28 persen). Jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun terakhir, kinerja capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan setiap tahunnya

Dibanding angka harapan lama sekolah tingkat provinsi dan Nasional, capaian Dharmasraya masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Bahkan jika dibanding dengan angka nasional, angka harapan lama sekolah masih berada di bawahnya sebesar 12,95. Ini perlu upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.

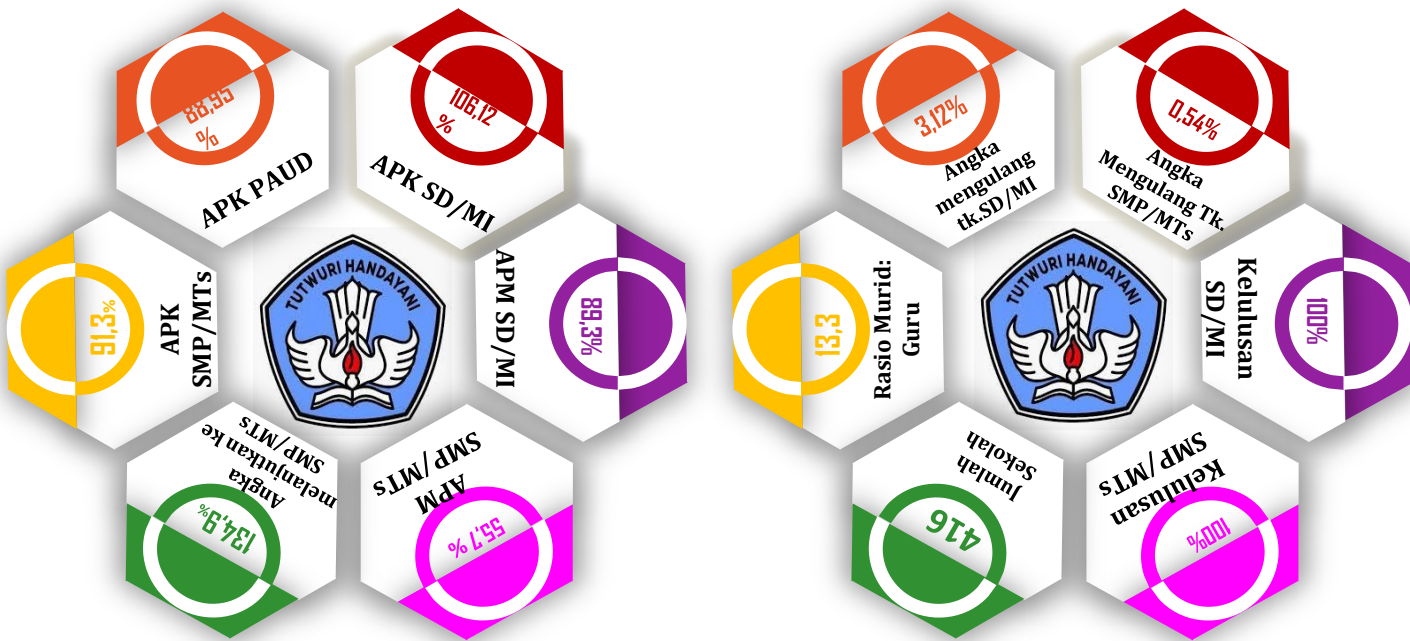


Sumber: BPS Dharmasraya; 2020 (data diolah)



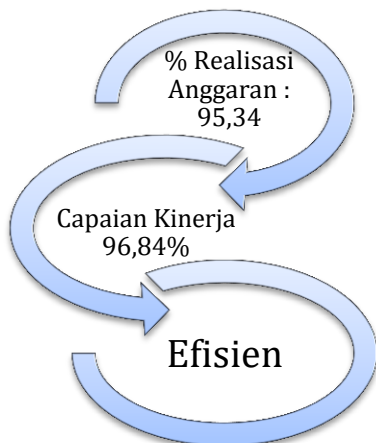
Juara Umum Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya; 2020

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 10 Program dan 204 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 87.153.021.057



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 87.153.021.057,- terealisasi Rp 83.088.026.057,- (95,34 persen). Sementara capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 96,84 persen atau dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat efisien.

C. Sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Terpenuhinya Hak Anak

sasaran ini diukur dengan dua indikator, yaitu indek pembangunan gender (IPG) dan indek pemberdayaan gender (IDG). Untuk IPG ditargetkan 89,53 terealisasi 88,30 atau dengan capaian 98,63 persen. Target IDG ditetapkan sebesar 49,65 terealisasi 48,91 atau tercapai sebesar 99,67 persen. Dengan angka tersebut diperoleh **mean 92,5** atau masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

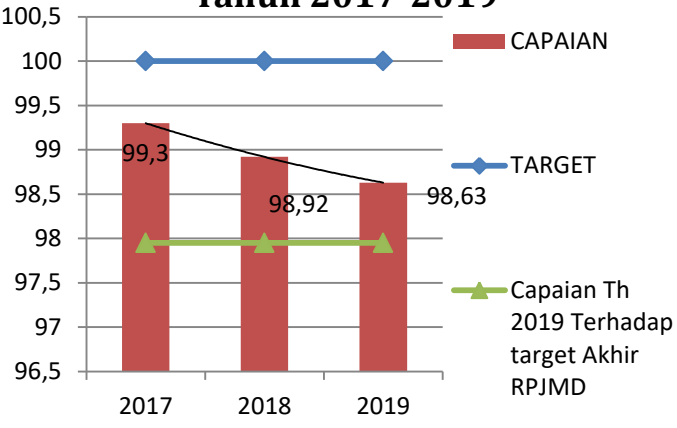


INDIKATOR INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

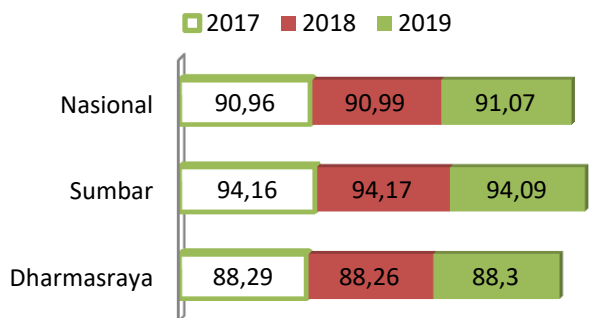
Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, serta meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Capaian IPG Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 adalah 88,3. angka tersebut merupakan 98,63 persen dari target yang ditetapkan. Berarti upaya Pemkab Dharmasraya dalam membangun peranan kaum perempuan dan laki laki dalam menjalankan kehidupan di tengah masyarakat boleh dikatakan sangat berhasil. Namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir, capaian kinerja IPG dibandingkan target yang ditetapkan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara usia harapan hidup perempuan dengan laki-laki, angka partisipasi sekolah perempuan

Capaian Kinerja IPG Tahun 2017-2019



Capaian IPG Kabupaten Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional

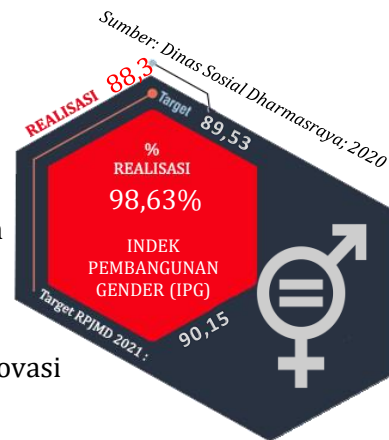


Sumber: Dinas Sosial Kab. Dharmasraya; 2020

dan lelaki serta kesenjangan indeks distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki di kehidupan masyarakat Kabupaten Dhasmasraya

Capaian IPG dalam tiga tahun terakhir yang cenderung naik.

Pada tahun 2017 IPG Kabupaten Dharmasraya 88,29 menjadi 88,3. meskipun mengalami kenaikan, namun IPG Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah IPG Provinsi Sumatera barat tahun 2019 sebesar dan juga IPG nasional yang mencapai 91,07. kondisi ini mewajibkan Pemkab Dharmasraya untuk terus berinovasi agar IPG di masa datang bisa mengikuti angka provinsi dan nasional.



Sumber: Dinas Sosial Dharmasraya; 2020

INDIKATOR INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)



IDG berfungsi untuk mengukur kesetaraan Wanita dan pria dalam partisipasi politik dan

pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Capaian nilai IDG di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pencapaian tahun 2019 merupakan capaian kinerja tertinggi selama 3 tahun

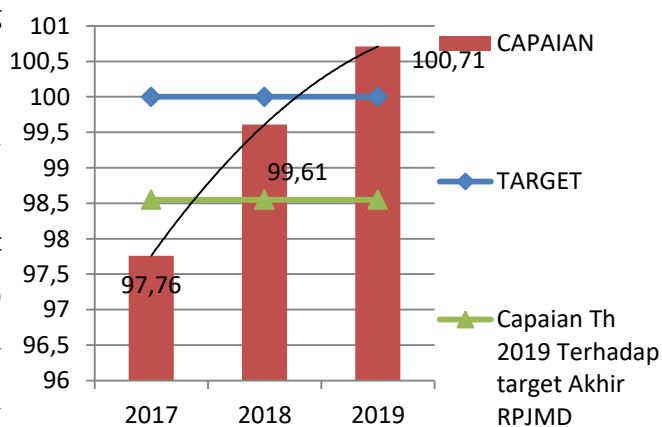
Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 sebesar 50 atau 100,71% dari target yang ditetapkan dengan kategori sangat berhasil.

Meskipun capaian IDG kabupaten dinilai sangat berhasil, namun jika dibandingkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, capaian kinerja IDG dibandingkan target yang ditetapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan jika dibandingkan dengan angka IDG Provinsi Sumbar tahun 2019 sebesar 65,7 dan nasional 72,1 maka capaian IDG Kabupaten Dharmasraya masih sangat jauh tertinggal.

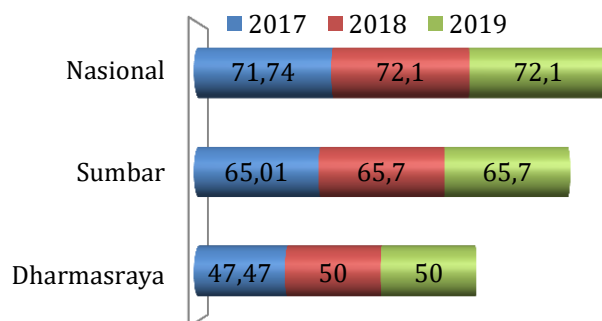
ketertinggalan Kabupaten Dharmasraya di bandingkan Provinsi dengan nasional salah satunya disebabkan oleh rendahnya keterlibatan perempuan didalam parlemen, dari 30 orang anggota parlemen di Kabupaten Dharmasraya, hanya 2 (dua) atau 6% anggota perempuan, hal ini sangat jauh dari standar minimal sebesar 30% kuota perempuan di parlemen.

Oleh karena itu diperlukan kerja keras, inovasi dan anggaran yang memadai untuk memberdayakan wanita di Kabupaten Dharmasraya agar beran aktif serta berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi maupun bidang politik, sehingga dapat meningkatkan IDG Kabupaten Dharmasraya di masa mendatang.

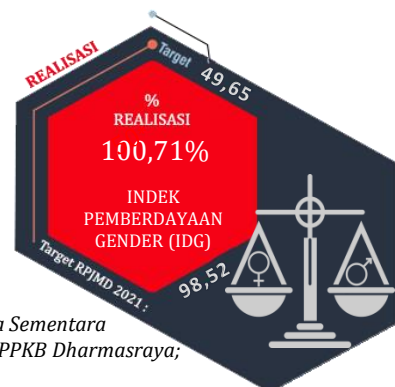
Capaian Kinerja IDG Tahun 2017-2019



Capaian IDG Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



Sumber: Dinsos P3APPKB Dharmasraya; 2020



Keterangan) *Angka Sementara
Sumber: Dinsos P3APPKB Dharmasraya; 2020(data diolah)

Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Terpenuhi Hak Anak

Rata-rata Lama Sekolah
 Pria : 8,67 Wanita : 8,23

Usia Harapan Hidup
 Pria : 68,71 Wanita : 72,64

Harapan Lama Sekolah
 Pria : 12,33 Wanita : 12,51

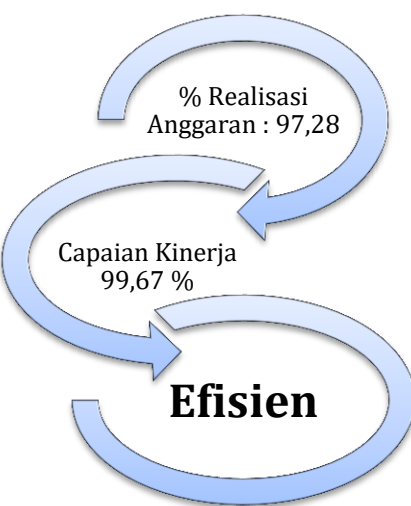
IPM
 Pria : 75,46 Wanita : 66,6

Pengeluaran Per Kapita per hari
 Pria : Rp.17,013 Wanita : Rp.7.558



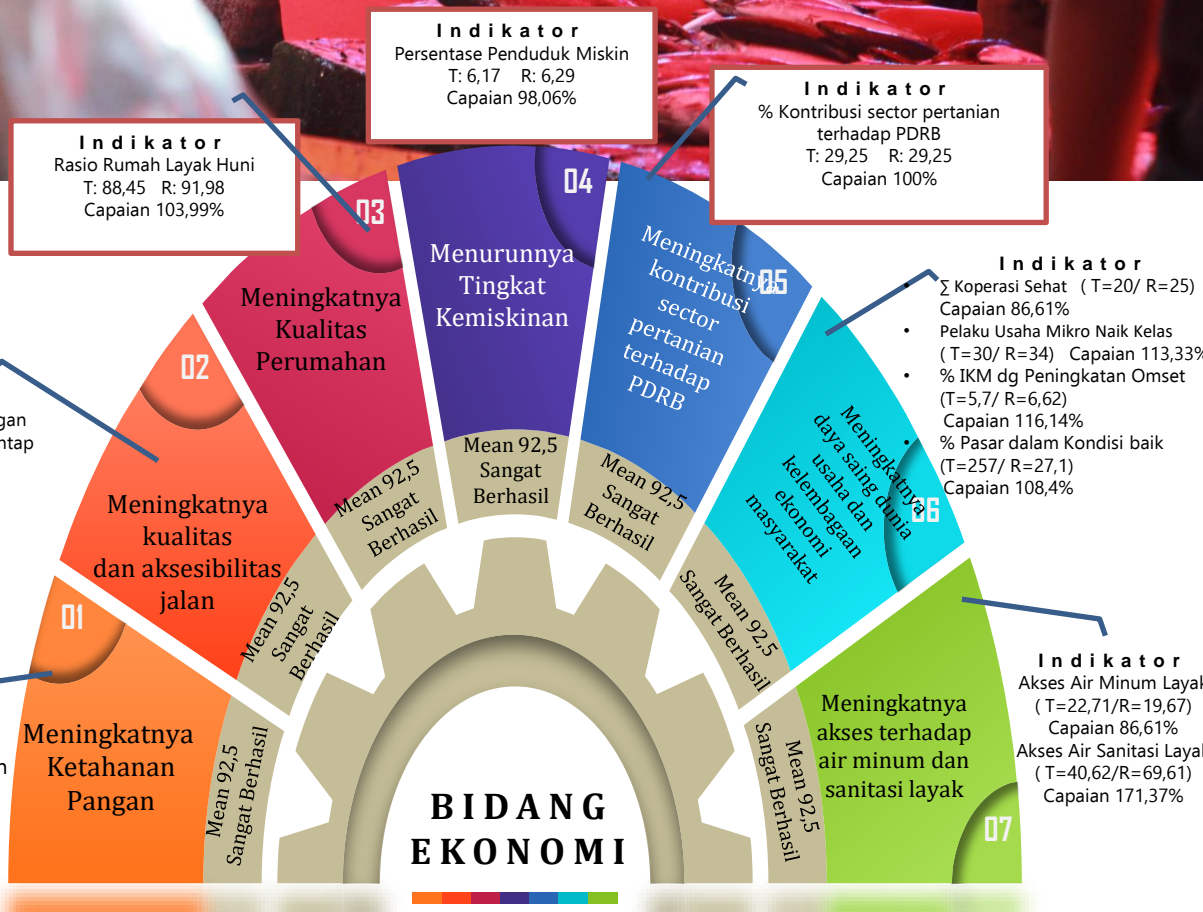
Sumber: Dinsos P3APPKB Dharmasraya; 2020

Keberhasilan meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak didukung oleh beberapa program antara lain. Program keluarga berencana (KB) belakangan juga diarahkan agar bagaimana penguatan peranan perempuan dan laki-laki dapat lebih proporsional dalam merencanakan, mengelola dan mengendalikan kehidupan keluarga. Program peningkatan pendidikan politik masyarakat. Program ini dinilai cukup berhasil dengan tampilnya kaum perempuan di lembaga wakil rakyat. Program peningkatan peran serta kepemudaan juga mendorong peningkatan sasaran ini. di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, untuk mencapai kinerja sasaran ini pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, seperti pemberdayaan organisasi wanita, PKK, dasawisma dan organisasi wanita lainnya juga dilaksanakan.



jika disimpulkan, dalam mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan menetapkan 9 Program dan 22 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.822.597.066,-. Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Terpenuhi Hak Anak dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 9.822.597.066,- terealisasi Rp 9.554.971.166,- (97,275 persen). Sementara capaian kinerja dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat efisien.

2. BIDANG EKONOMI



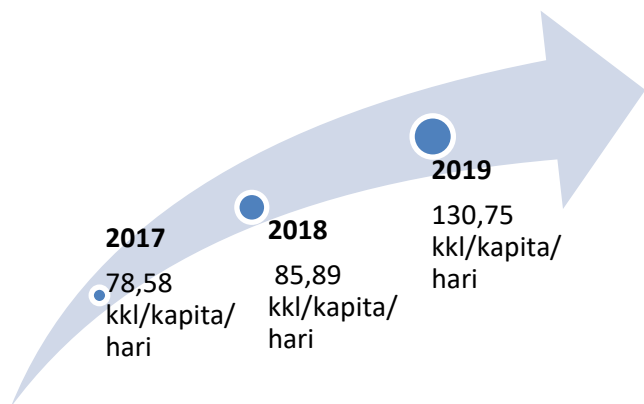
Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa bidang EKONOMI ditetapkan 7 sasaran dengan 11 indikator, dari 7 Sasaran yang menjadi fokus Ekonomi, seluruhnya mencapai prediket sangat berhasil dengan nilai mean 92,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Ekonomi sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya

Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Persentase Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita

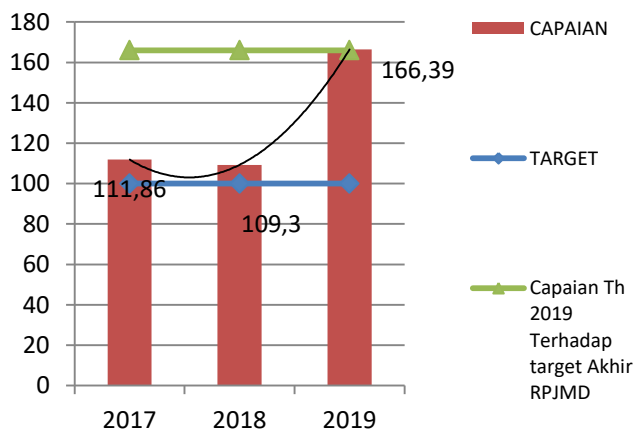
Ketahanan pangan menjadi pilar penting dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus dipermantap posisinya. Indikator keberhasilannya diukur dari ketersediaan energi dan protein per kapita. Pada tahun 2019, ketersediaan energi dan protein ditargetkan 78,58 kkal/kapita/hari. Target tersebut tercapai sebesar 130,75 kkal/kapita/hari. Capaiannya 166 persen, dengan nilai mean 92,5 atau dengan kategori sangat berhasil

Ketersediaan Energi dan Protein Dalam Tiga Tahun Terakhir



Sumber: Dinas Pangan Perikanan Kab. Dharmasraya; 2020

Capaian Kinerja Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita



jika ditilik ke belakang, trend ketersediaan kalori dan protein di Kabupaten Dharmasraya boleh dibilang dalam kondisi stabil. Bahkan capaiannya juga dalam katagori sangat berhasil. Pada tahun 2017, angka ketersediaan kalori dan protein mencapai 78,58 kkal/kapita/hari. Kondisi tersebut naik menjadi 85,89 kkal/kapita/hari di tahun 2018. Ketahanan pangan ini ke depan harus terus menjadi perhatian Pemkab Dharmasraya. Sebab stabilitas ketersediaan pangan akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat.

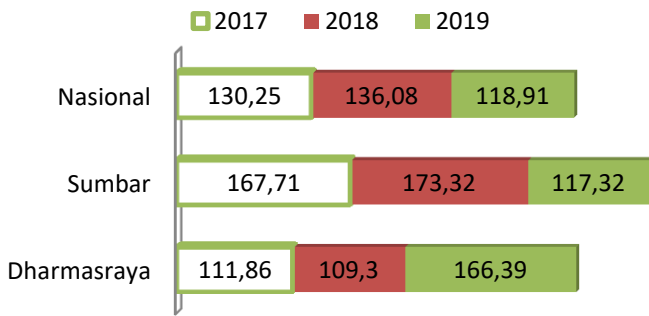
Keberhasilan ini dikarenakan Pemkab Dharmasraya memang sangat komitmen untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Berbagai program digelar dan pada umumnya berhasil, seperti intensifikasi pekarangan

sebagai sumber bahan pangan keluarga. Selain itu, program penguatan lumbung pangan nagari juga dinilai cukup berhasil.



Sumber: Dinas Pangan Perikanan Dharmasraya; 2020

Capaian % Ketersediaan Kalori dan Protein Kabupaten Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



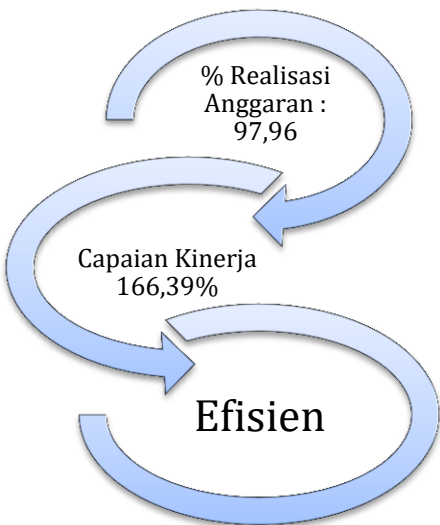
Sumber: Dinas Pangan Perikanan Kab. Dharmasraya; 2020

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, capaian persentase ketersediaan kalori dan protein di Kabupaten Dharmasraya tertinggi melebihi pencapaian Provinsi dan Nasional, hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menjamin masyarakatnya memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan protein dan kalori, selain itu,

Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Meningkatnya Ketahanan Pangan



Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 5 Program dan 14 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.415.334.698



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 2.415.334.698,- terealisasi Rp 2.366.168.886 ,- (97,96 persen). Sementara capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 166,39 persen atau dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat efisien.

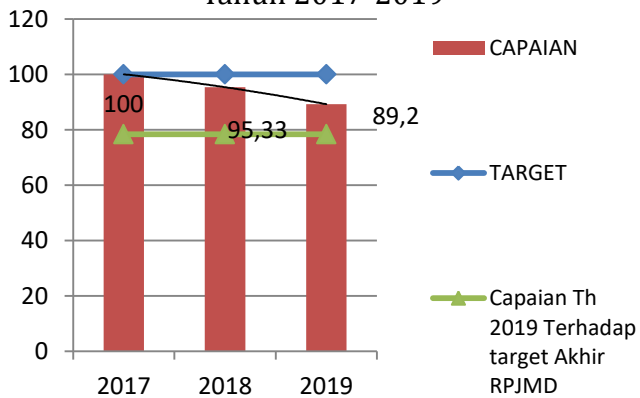


Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Jalan

Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Jalan diukur dengan indikator Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Pada tahun 2019, proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap ditargetkan sebesar 55,65 persen. Target tersebut terealisasi 49,64 persen atau tercapai sebesar 89,20 persen. Dalam indikator tersebut diperoleh nilai mean **92,5** persen atau masuk katagori **sangat berhasil**.

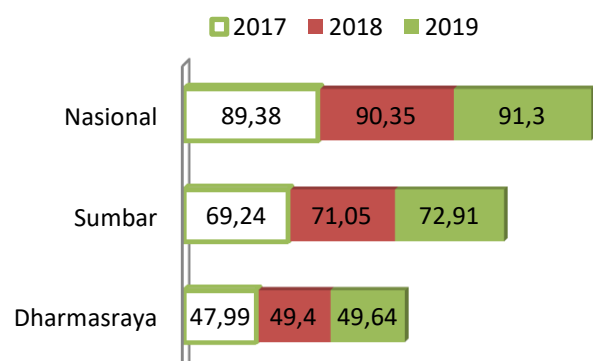
Capaian Kinerja Proporsi Jalan Mantap Tahun 2017-2019



Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didorong oleh terlaksananya program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan dan perawatan jalan kabupaten dan juga keberhasilan Pemkab Dharmasraya dalam mendorong agar nagari ikut melakukan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah masing masing. Dengan demikian, akses jalan di Kabupaten Dharmasraya makin baik.

Jika dibandingkan dari target yang ditetapkan, capaian kinerja proporsi jalan mantap menurun dari tahun 2017 hingga 2019, faktor utama penyebab penurunan ini adalah keterbatasan anggaran yang mampu dialokasikan Pemerintah Daerah untuk pembangunan serta perbaikan jalan.

Capaian Proporsi Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



proporsi Jalan dengan Kondisi mantap (>40km/Jam) di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 masih belum mencapai 50%, sedangkan jalan Provinsi dalam kondisi mantap ditahun yang sama telah mencapai 72,91% dan jalan Nasional dalam kondisi mantap sebesar 91,3 %,



Sumber: Dinas PUPR Kab. Dharmasraya; 2020

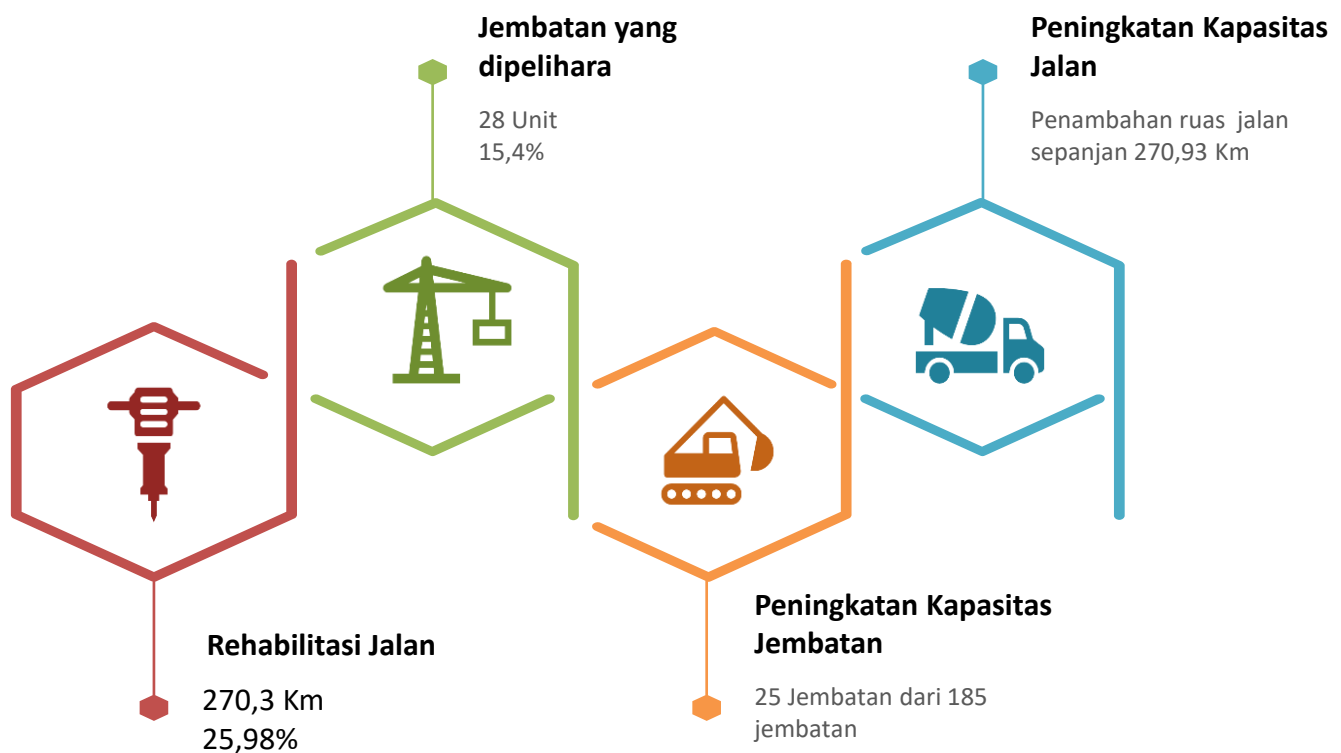
hal ini tentu masih perlu perhatian besar dari pemerintah daerah untuk membenahi jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Dharmasraya.

Faktor yang mendukung pencapaian Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (mantap)

- panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah 514,85 km sedangkan pada Tahun 2019 panjang jalan dalam kondisi baik 517,67 Km dari Panjang seluruh Jalan Kabupaten 1042,85 KM, pada Tahun Anggaran 2019 penambahan panjang jalan terdiri dari :
 - a. Dari Dana DAK sepanjang 19,96 km
 - b. Dari Dana APBD sepanjang 17,27 km

Selain itu beberapa faktor pendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

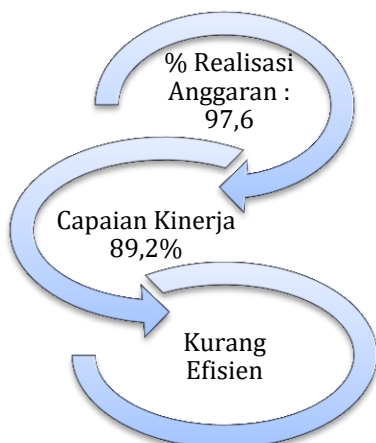
Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Jalan



Sumber: Dinas PUPR Kab. Dharmasraya; 2020

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 9 Program dan 24 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 64.191.195.061

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Jalan dinilai kurang efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 64.191.195.061,- terealisasi Rp 62.682.881.751,- (97,650 persen). Sementara capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 89,20 persen atau dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat kurang efisien.



Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan

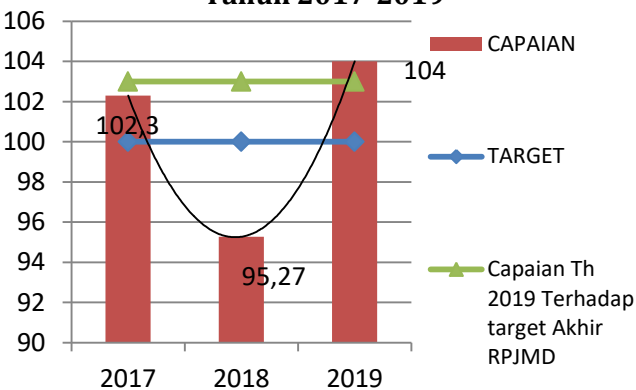


INDIKATOR RASIO RUMAH LAYAK HUNI

Pemerintahan yang baik adalah ketika Pemerintahan dapat menjamin ketersediaan kebutuhan primer masyarakatnya salah satunya adalah kebutuhan papan, hal ini yang mendasari kebutuhan papan menjadi bagian dari salah satu sasaran kinerja daerah yang harus dipenuhi.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan diukur dengan indikator rasio rumah layak huni. Pada tahun 2019, rasio rumah layak huni ditargetkan sebesar 88,45 persen. Target tersebut terealisasi 91,98 persen atau tercapai sebesar 103,99 persen. Dalam sasaran tersebut diperoleh nilai mean **92,5** persen atau masuk katagori **sangat berhasil**

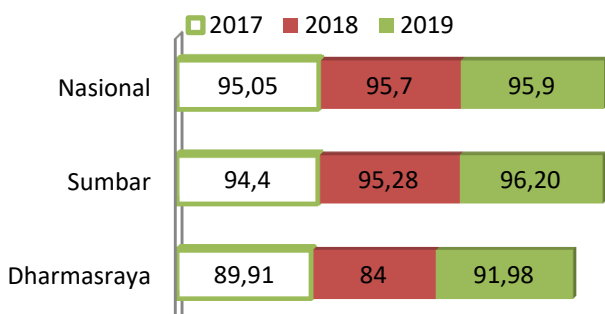
Capaian Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2017-2019



Rasio rumah layak huni di Kabupaten Dharmasraya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017, rasio rumah layak huni sebesar 89,91 persen dan menurun menjadi 84 persen pada tahun 2018 dan kembali naik pada tahun 2019. capaian tahun 2019 merupakan capaian tertinggi selama tiga tahun terakhir. Bahkan telah melebihi target yang ditentukan masa akhir RPJMD.

Walaupun capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Dharmasraya telah melebihi target yang ditetapkan, namun, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, Kabupaten Dharmasraya masih dibawah rasio rumah layak huni di

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Dharmasraya dibanding Provinsi dan Nasional



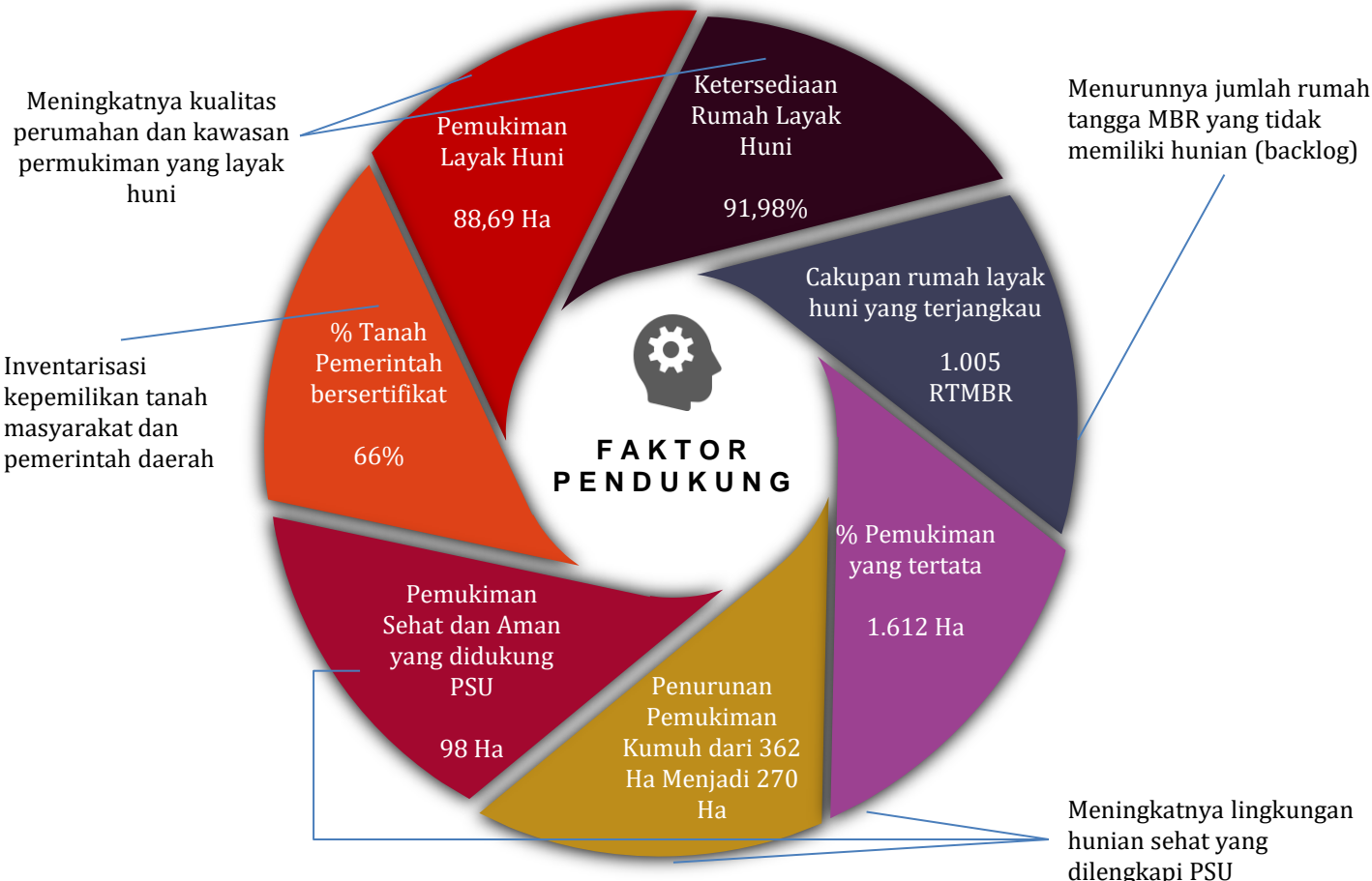
Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Dharmasraya; 2020

Provinsi Sumatera Barat Tahun

2019 sebesar 96,2 lebih tinggi dibanding rasio rumah layak huni secara nasional sebesar 95,9.

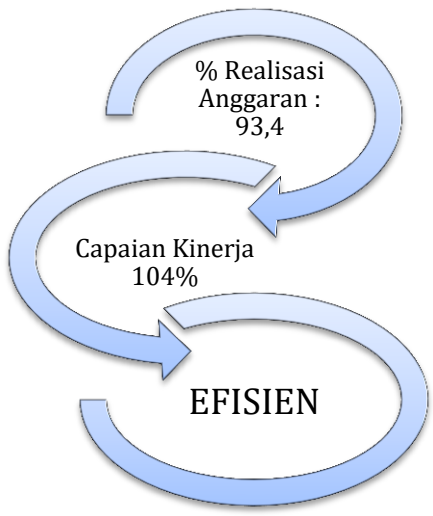


Besarnya capaian rasio rumah layak huni itu didukung oleh adanya pemberian bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni. Selain itu pemerintah juga mendorong masyarakat untuk secara mandiri membenahi rumahnya agar masuk dalam standar rumah layak huni. Melalui komunitas perumahan Pemkab Dharmasraya mengembangkan rumah layak huni. Penataan kawasan perumahan juga mendorong adanya kesadaran masyarakat untuk membangun dan merehabilitasi rumah mereka sehingga bisa menjadi rumah layak huni.



Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Dharmasraya; 2020

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perumahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 9 Program dan 14 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.815.429.689,-



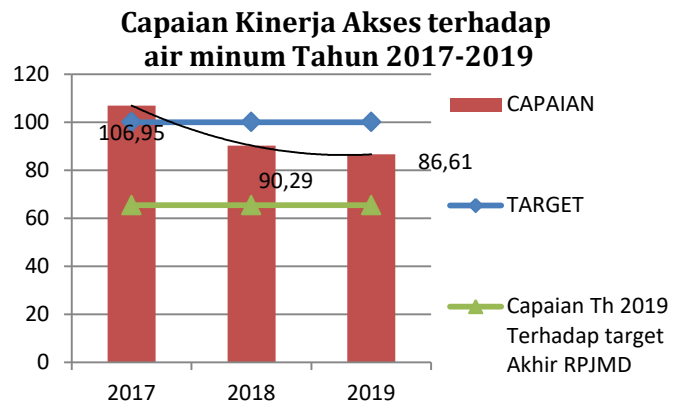
Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Perumahan dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 14.815.429.698,- terealisasi Rp 13.828.213.390,- (93,337 persen). Sementara capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 103,99 persen atau dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat efisien.



Meningkatnya Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak

Untuk mengetahui sejauh mana sasaran ini bisa dicapai, maka ditetapkan indikator persentase akses air minum yang layak dan persentase sanitasi yang layak.. Dari dua indikator diatas didapatkan nilai mean 92,5 atau masuk dalam kategori sangat berhasil

Indikator Akses terhadap air minum layak

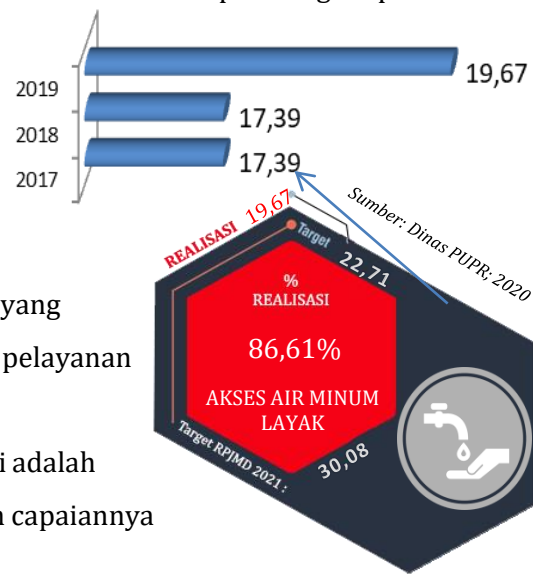


Capaian indikator akses terhadap air minum yang layak mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019, hal ini di karenakan tingginya target yang ditetapkan serta kurangnya alokasi anggaran untuk penambahan akses air minum yang layak kepada masyarakat, sehingga masih dibutuhkan prioritas dari pemerintah daerah untuk memenuhi akses masyarakat terhadap air minum yang layak.

Pada tahun 2019, Pemkab Dharmasraya menetapkan target angka akses air minum yang layak sebesar 22,71 persen. Target tersebut terealisasi sebesar 19,67 persen, dengan capaian 86,61 persen.

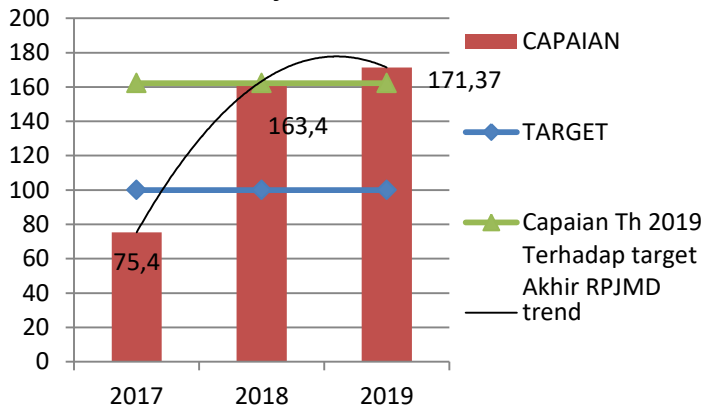
Untuk akses air minum layak ini dihitung hanya dari pelayanan system perpipaan saja sesuai dengan kegiatan yang ada pada Program Pengembangan Air Minum dan air Limbah Adapun Tingkat persentase pelayanan air minum Perpipaan adalah sebagai berikut :

1. SPAM yang dikelola oleh UPT SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Sambungan Rumah (SR) jumlah penduduk terlayani sebanyak 7.525,- jiwa dengan persentase tingkat pelayanan capaiannya sebesar 3,07 %
1. SPAM Pamsimas yang dikelola oleh masyarakat, jumlah penduduk yang terlayani adalah sebanyak 32.452,- jiwa dengan persentase tingkat pelayanan dengan capaiannya sebesar 13,24 %
3. SPAM yang dikelola Nagari/Jorong jumlah penduduk yang terlayani adalah sebanyak 2.095,- jiwa dengan persentase tingkat pelayanan dengan capaiannya sebesar 0,86 %



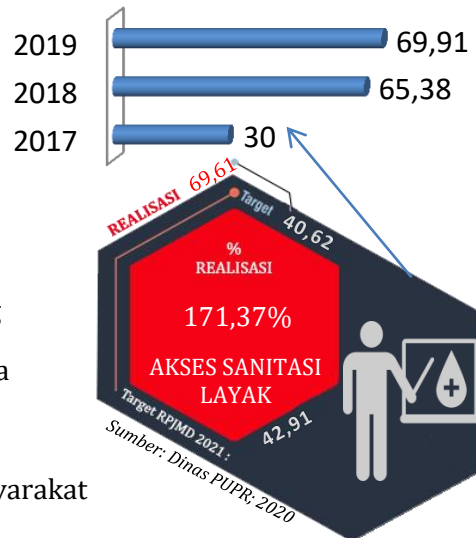
Indikator Akses terhadap Sanitasi layak

Capaian Kinerja Akses terhadap Sanitasi layak Tahun 2017-2019

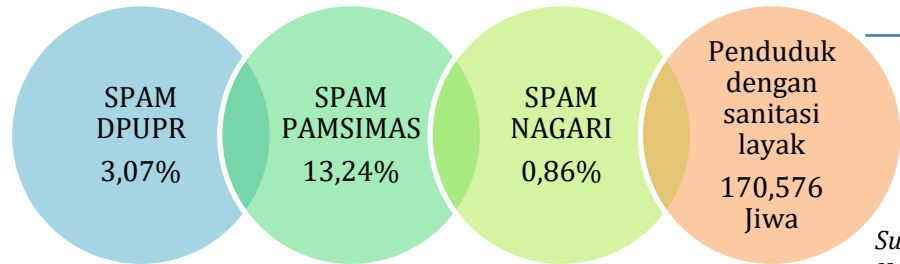


sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. akses sanitasi layak yang ditargetkan sebesar 40,62 persen dan realisasi 69,61 persen dengan capaian 171,37 persen. Capaian ini meningkat drastis dari tahun 2017 hingga 2019, bahkan jika dibandingkan dengan capaian di akhir RPJMD, Kabupaten Dharmasraya telah menuntaskan masalah akses sanitasi yang layak di masyarakat

Pada indikator Sasaran Akses Sanitasi Layak dengan target 40,62% dengan realisasi 69,61% dan capaian 171,38 %. realisasi ini di dapat dari jumlah penduduk yang terlayani (jiwa) 170.576,- dibagi jumlah penduduk 245.028 jiwa. sanitasi yang layak di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah dan masyarakat.

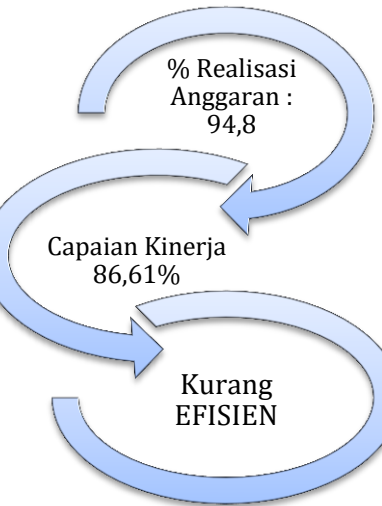


Keberhasilan capaian meningkatnya akses dan sanitasi yang layak didorong oleh berbagai program, antara lain adanya perbaikan kinerja PDAM. Selain itu, Pemkab Dharmasraya mendorong kelompok kelompok masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas). Inventarisasi sumber sumber air baku juga terus dilakukan. Pengalokasian anggaran yang proporsional terhadap pengembangan Pamsimas, telah mendorong naiknya akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.



Faktor Pendukung Pencapaian

Sumber: Dinas PUPR Dharmasraya:2020
Ket ;SPAM (Sumber Penyediaan Air Minum)



Pemerintah Kabupaten Dhamasraya menetapkan 2 Program dan 6 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.875.873.344,- untuk mencapai sasaran ini.

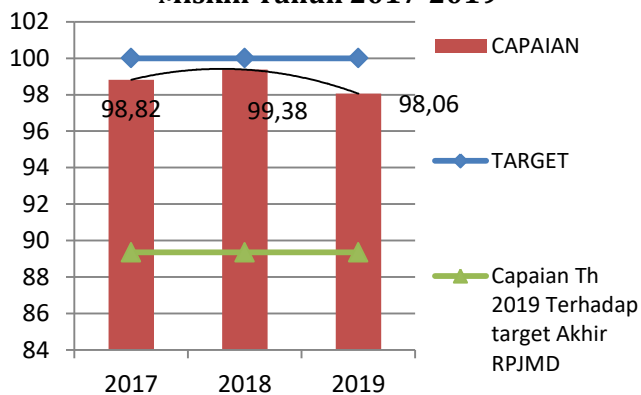
Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akses Terhadap Air Minum dan Sanatasi Yang Layak dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 10.875.873.344,- terealisasi Rp 10.306.755.564,- (94,767 persen). Sementara capaian kinerja 86,61. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini Kurang efisien.

Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi bagian penting dari sasaran kinerja Pemkab Dharmasraya. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase penduduk miskin. Pada tahun 2019, target persentase penduduk miskin adalah 6,17 persen. target tersebut tercapai dengan sangat baik, yaitu 6,29 persen. Capaian tersebut 98,06 persen atau berketagori sangat berhasil dengan nilai mean 92,5.

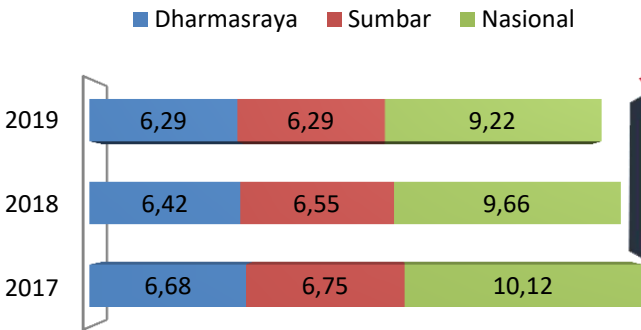
Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2019



Capaian Kinerja menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018, pada tahun 2019 capaian penurunan penduduk miskin sebesar 98,06%, jika dibanding dengan capaian RPJMD, capaian penduduk miskin baru mencapai 89,35%, sehingga masih perlu di fokuskan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.

Selama tiga Tahun berturut-turut tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya selalu mengalami penurunan, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,26 point, jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya dalam tiga tahun terakhir berada di bawah kemiskinan Nasional, pada tahun 2019 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya sama dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,29 %. Dan jauh lebih rendah dibanding penduduk miskin nasional 9,22 persen.

Kontribusi pengentasan kemiskinan Kabupaten Dharmasraya cukup besar untuk provinsi dan nasional dalam pengentasan kemiskinan.

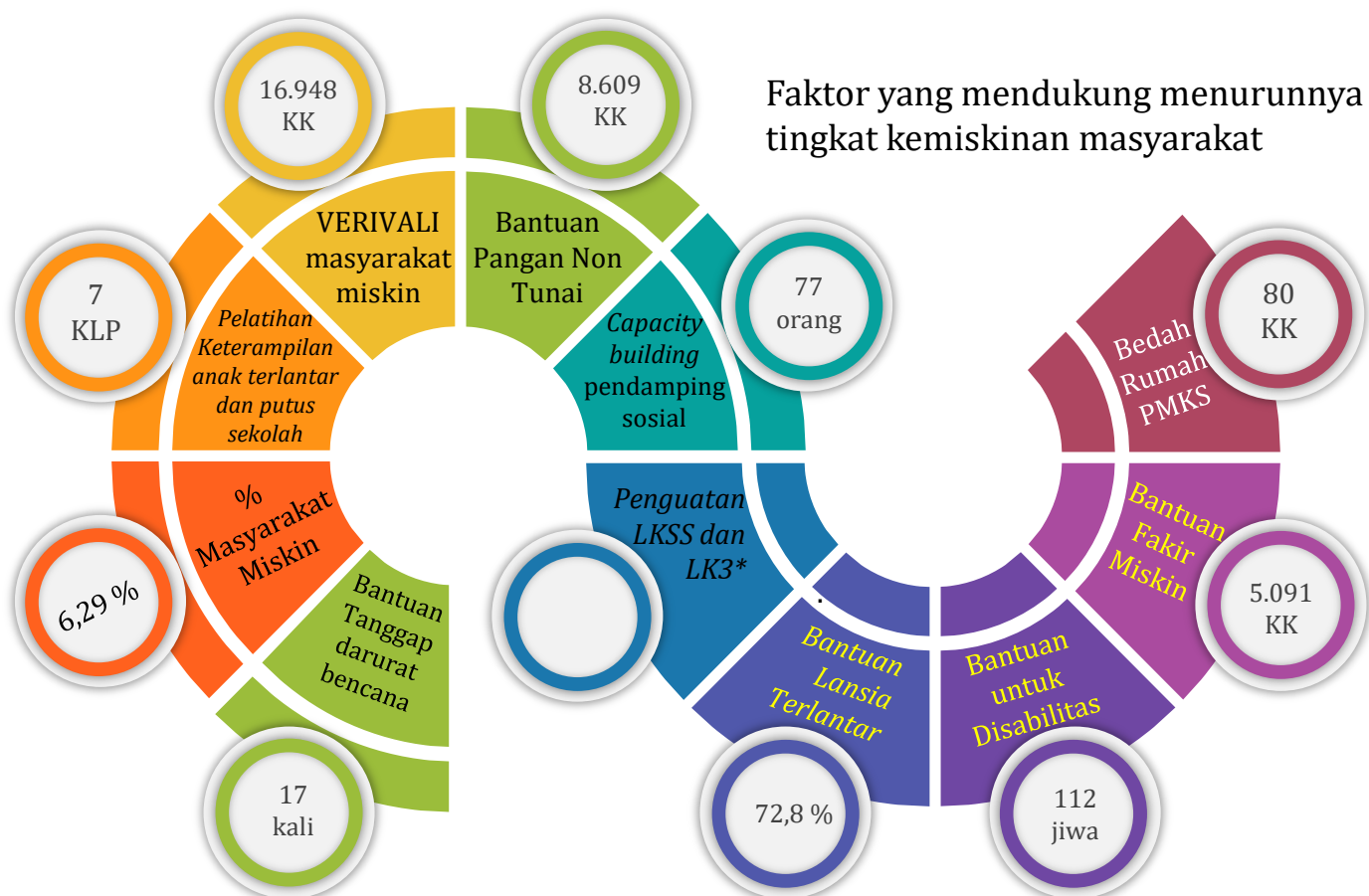


REALISASI 6,29
Target 6,17
% REALISASI 98,06
% PENDUDUK MISKIN
Target RPJMD 2021: 5,62

Sumber: Dinsos P3APPKB Dharmasraya; 2020

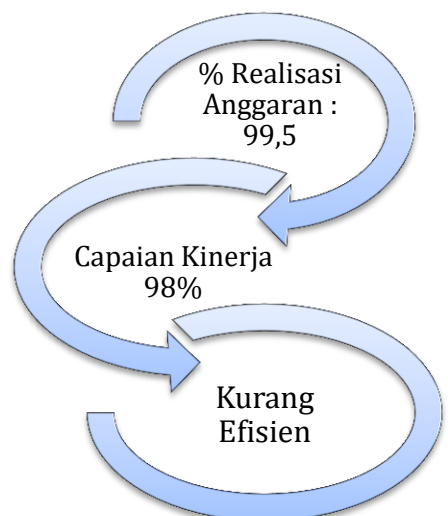
Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan itu dipicu oleh keberhasilan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Dharmasraya, antara lain program pengentasan kemiskinan. Pemkab Dharmasraya membentuk tim penanggulangan tingkat kemiskinan yang bekerja mengkoordinasikan berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh semua stakeholders

Selain itu, program sektoral terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat juga cukup berhasil, di antaranya intensifikasi pertanian, pengembangan usaha kecil dan menengah dan juga membaiknya iklim usaha di Kabupaten Dharmasraya. Ini secara tidak langsung telah menambah pendapatan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan



Sumber: Dinsos P3APPKB Dharmasraya; 2020

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 4 Program dan 13 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 987.998.150,-



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 987.988.150,- terealisasi Rp 982.553.768,- (99,450 persen). Sementara capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 98,06 persen atau dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat kurang efisien.

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB



Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

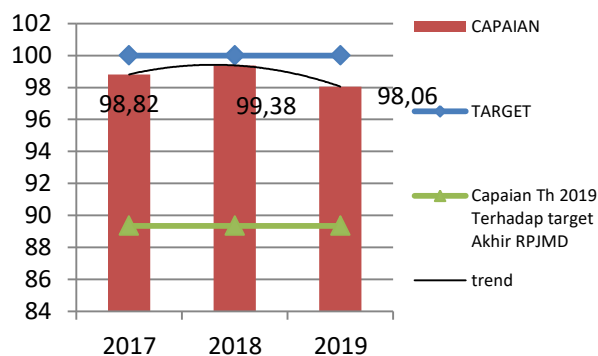
Untuk mengetahui sejauh mana pengembangan sektor pertanian, maka ditetapkan indikator persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Pada tahun 2019, peranan sektor pertanian terhadap PDRB ditargetkan sebesar 29,25 persen. Realisasi yang dapat diwujudkan sebesar 29,25 persen. Ini berarti tingkat capainnya 166,3persen atau dalam katagori **sangat berhasil** dengan nilai mean **92,5**.

Capaian PDRB terhadap sektor pertanian telah sangat berhasil, capaian indikator tersebut di tahun 2019 telah mencapai 166,3%, capaian ini bahkan telah melebihi target yang ditetapkan di akhir tahun RPJMD, hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah memfokuskan pencapaian sektor pertanian terhadap perkembangan PDRB.

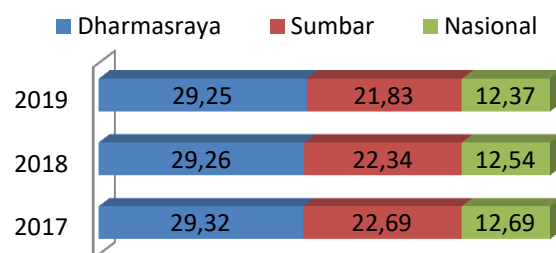
Meskipun Kabupaten Dharmasraya sukses meningkatkan peranan sektor pertanian terhadap PDRB, namun bila dibanding dengan indikator yang sama untuk rata rata Sumatera Barat (21,83 persen) dan nasional (12,37 persen), ternyata angkanya masih jauh lebih tinggi. Keberhasilan Pemkab Dharmasraya dalam meningkatkan peranan sektor pertanian terhadap PDRB didukung oleh berbagai program.

Pemkab Dharmasraya menyelenggarakan intensifikasi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam usaha budidaya tanaman pangan, peternakan, perikanan dan juga perkebunan. Selain melaksanakan intensifikasi, Pemkab Dharmasraya juga melaksanakan ekstensifikasi. Dengan demikian produksi pertanian bisa meningkat dan juga pendapatan petani meningkat.

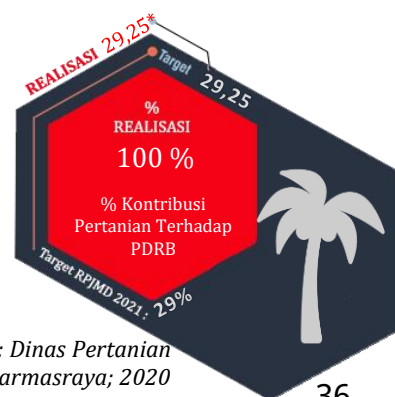
Capaian Kinerja % kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017-2019



Perbandingan persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

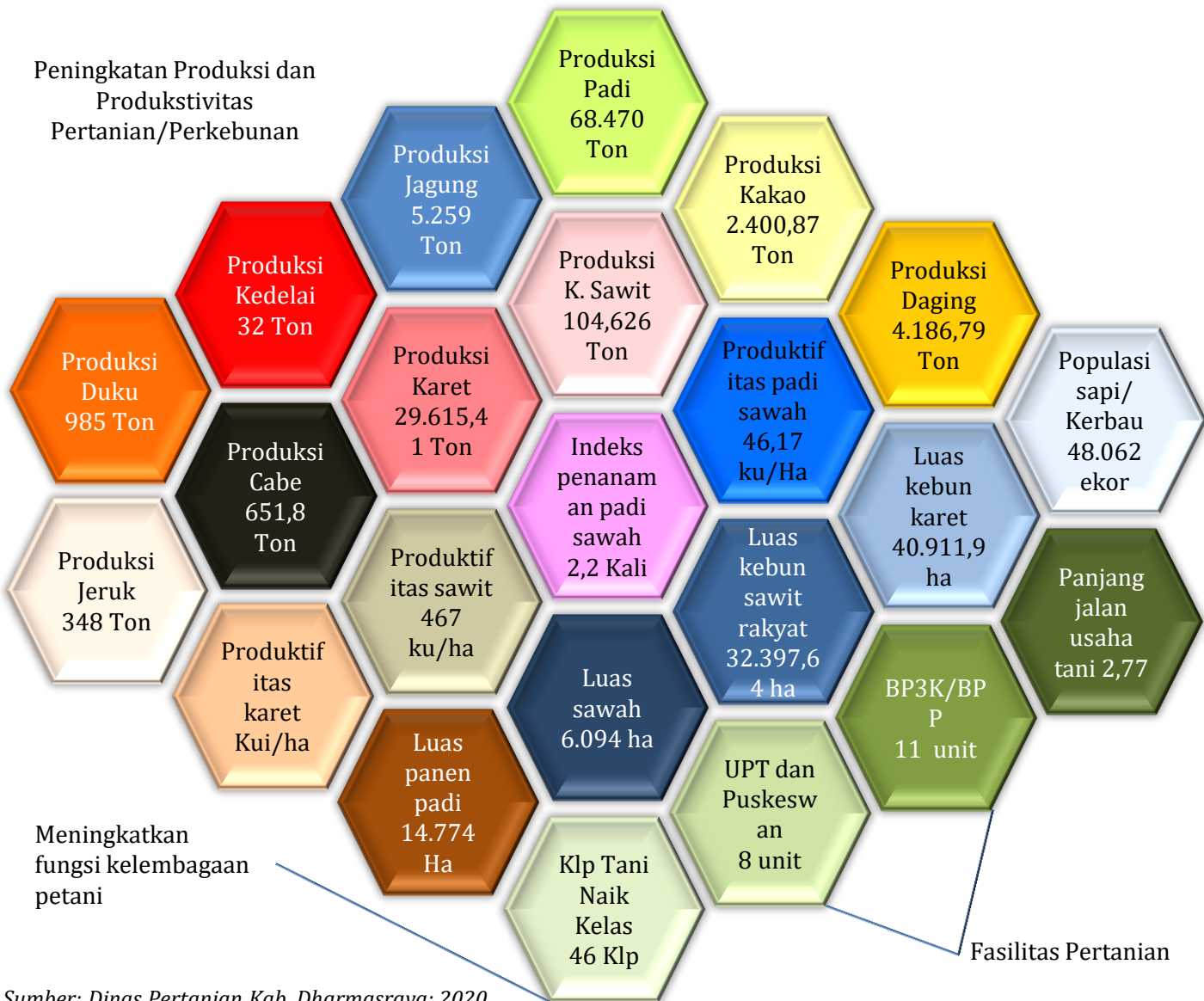


Sumber: Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya; 2020



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya; 2020

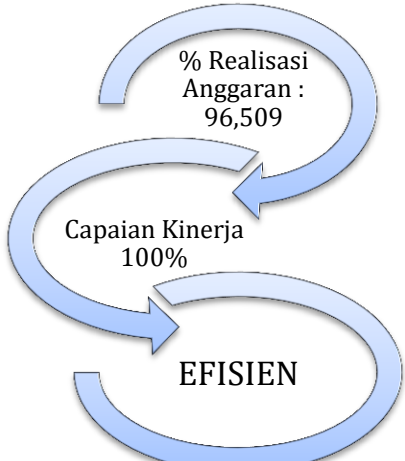
Di luar itu, Pemkab Dharmasraya juga membangun jaringan irigasi, mendorong pemberian modal oleh perbankan, membangun pasar dan sarana perhubungan serta mengintroduksi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil. Upaya ini juga mendorong makin besarnya nilai tukar petani di Kabupaten Dharmasraya.



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya; 2020

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 8 Program dan 33Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.723.677.950,-

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 10.723.677.950,- terealisasi Rp 10.349.339.875,- (96,509 persen). Sementara capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100 persen atau dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat efisien.



Sasaran Meningkatkan Daya Saing Dunia Usaha dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

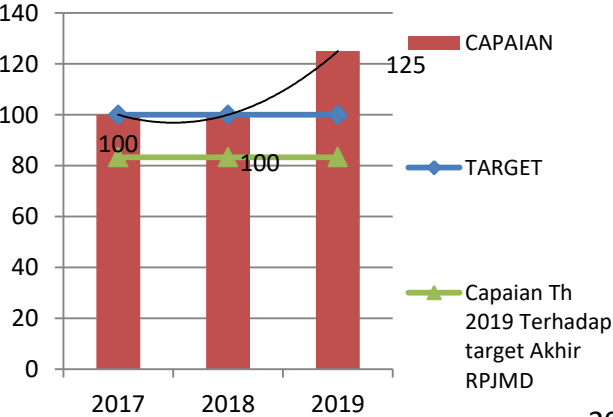


Untuk mengukur sasaran meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat, Kabupaten Dharmasraya menetapkan 4 indikator antara lain, 1. jumlah koperasi sehat, 2. pelaku usaha mikro naik kelas, 3. persentase IKM dengan peningkatan Omset, 4.. Persentase pasar dalam kondisi baik. Rata-rata capaian sasaran ini sebesar 115,63 dengan kategori **Sangat Berhasil** dengan nilai **Mean 92,5**

1. Jumlah Koperasi Sehat

Untuk indikator jumlah koperasi sehat, Pemkab Dharmasraya menargetkan 20 unit pada tahun 2019. target tersebut bisa dicapai dengan sangat baik sebesar 25 unit. Itu berarti capaian indikator tersebut sebesar 125 persen. Pencapaian jumlah koperasi sehat di Kabupaten Dharmasraya sudah sangat berhasil, namun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021, masih dibutuhkan 17 % lagi yang perlu dicapai.

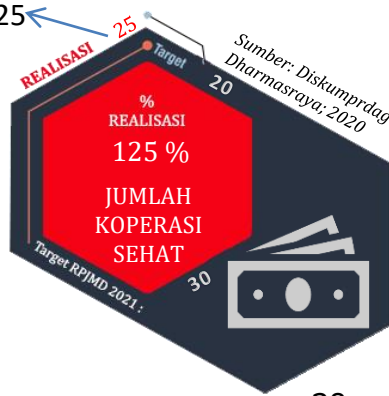
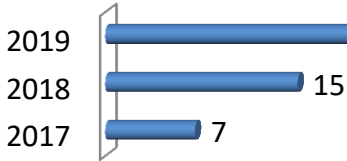
Capaian Jumlah Koperasi Sehat Tahun 2017-2019



Untuk meningkatkan kualitas manajemen koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan melaksanakan pembinaan terhadap koperasi dan pelatihan pengelolaan simpan pinjam koperasi.

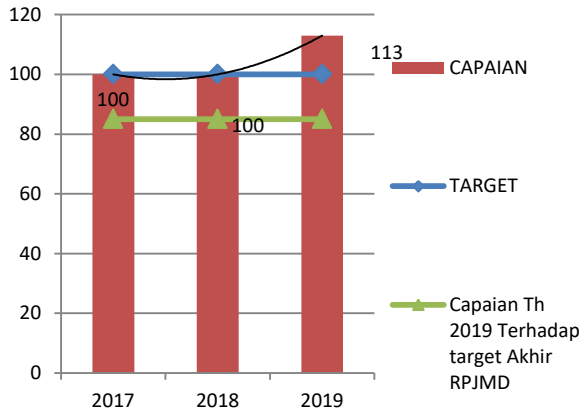
Keberhasilan capaian indikator tersebut itu didukung oleh langkah dan kebijakan Pemkab Dharmasraya dalam pembinaan koperasi. Pemkab Dharmasraya mengintensifkan pembinaan koperasi, terutama yang menyangkut dengan organisasi, keanggotaan dan juga unit usaha yang dilakukan oleh koperasi sehingga koperasi sangat berperan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Setiap koperasi didorong untuk melaksanakan rapat anggota tahunan tepat waktu dan mematuhi anggaran dasar yang ada.



2. Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas

Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas adalah jumlah pelaku usaha mikro yang telah meningkat dan memenuhi kriteria skala usaha kecil. Pada tahun 2019, pengusaha mikro yang naik kelas ditargetkan 30 unit. Target tersebut bisa dicapai dengan sangat berhasil. Bahkan realisasinya melampaui angka yang ditargetkan, yaitu 34 unit atau 113,23 persen.

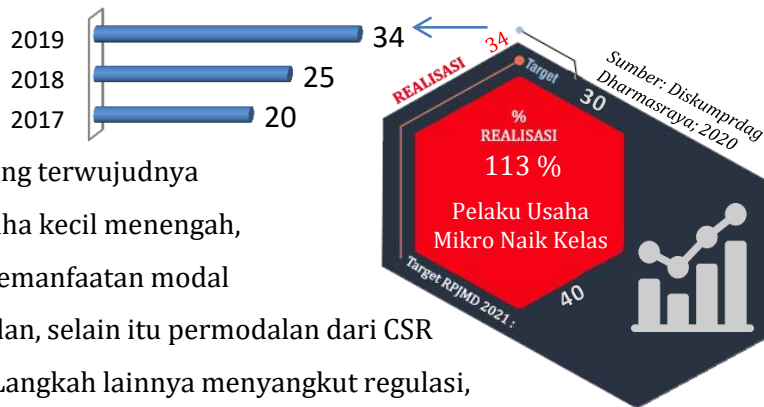
Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2017-2019



Pemkab Dharmasraya juga mendorong terwujudnya

kemitraan antara pengusaha mikro dengan pengusaha kecil menengah, terutama dalam pemasaran produksi, mendorong pemanfaatan modal perbankan dan kontribusi koperasi dalam permodalan, selain itu permodalan dari CSR perusahaan perusahaan besar yang ada di daerah. Langkah lainnya menyangkut regulasi, dimana perizinan dan keamanan dipermudah dan distabilkan. Oleh karena itu, dalam tiga tahun terakhir, kenaikan kelas bagi usaha mikro cenderung mengalami peningkatan.

pelaku usaha mikro naik kelas ini didorong oleh keberhasilan Pemkab Dharmasraya dalam membangun iklim kondusif bagi berkembangnya dunia usaha mikro, antara lain dengan menciptakan peluang produk bagi usaha mikro, terutama di bidang produk makanan lokal. Pelaku usaha mikro juga diberikan pelatihan teknis terkait dengan pembuatan produk, disain, pemasaran dan manajemen keuangan.



3. persentase IKM Dengan Peningkatan Omzet

Omzet industri kecil dan menengah (IKM) yang mengalami peningkatan di tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,7 persen. Namun kenyataannya target tersebut bisa dicapai hingga 116,14 persen. Ini merupakan capaian yang sangat berhasil, sehingga pada akhir 2019 IKM yang mengalami peningkatan Omzet mencapai 6,62 persen. Dan telah mencapai target tahun akhir RPJMD.

Peningkatan omzet IKM ini Didukung

oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan

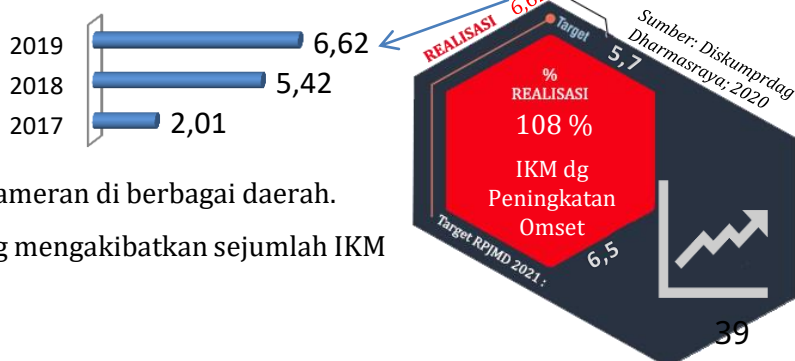
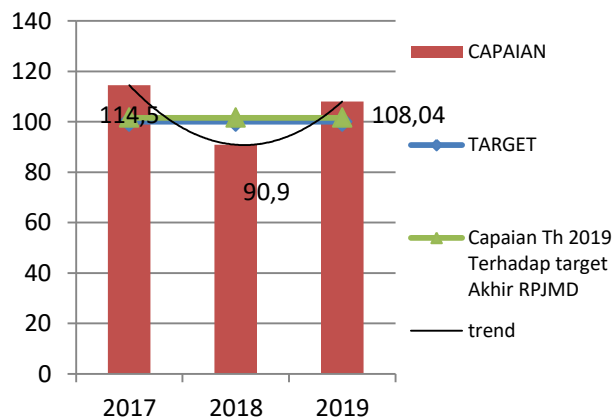
Pemkab Dharmasraya, seperti promosi produk-produk lokal di berbagai daerah.

Pemkab Dharmasraya selalu

mengikutsertakan pelaku IKM untuk mengikuti pameran di berbagai daerah.

Dengan demikian ada peningkatan penjualan yang mengakibatkan sejumlah IKM mengalami peningkatan Omzet.

Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet Tahun 2017-2019

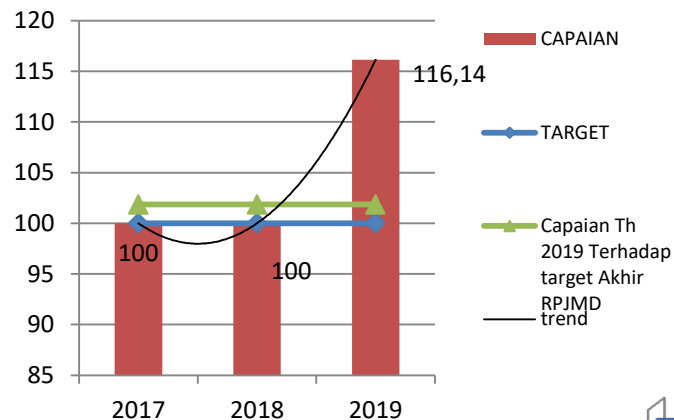


Selain mendorong peningkatan pemasaran, Pemkab Dharmasraya juga membantu peningkatan efisiensi biaya produksi, sekaligus meningkatkan produksi dengan cara menyediakan bahan baku yang lebih murah melalui kerjasama dengan koperasi, mendorong agar seluruh ASN memakai produk batik yang diproduksi oleh UKM di Kabupaten Dharmasraya

4. Persentase Pasar dalam Kondisi Baik

Pembangunan pasar, baik pasar nagari maupun pasar kabupaten terus diupayakan agar persentase pasar dalam kondisi baik terus meningkat. Tahun 2019, target persentase pasar dalam kondisi baik sebesar 25%, terealisasi 27% dengan capaian 108,04 %.

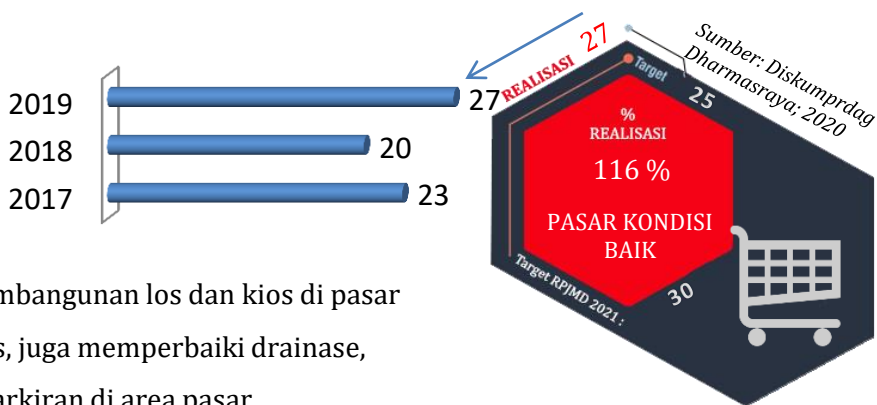
Persentase Pasar dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2019



Peningkatan persentase pasar dalam kondisi baik ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program.

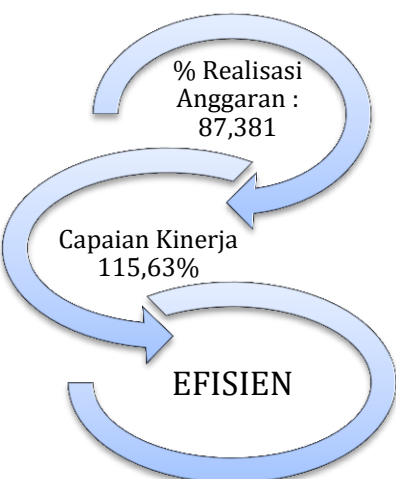
Beberapa program di antaranya adalah pembangunan los dan kios di pasar tradisional. Selain membangun kios dan los, juga memperbaiki drainase, mengelola persampahan dan menata parkir di area pasar.

Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah sebanyak 8 pasar, jika diakumulasikan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah pasar dalam kondisi baik sudah berjumlah 30 pasar atau sebesar 81,08 % dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 98 %. Jumlah seluruh pasar rakyat pada tahun 2019 adalah sebanyak 37 pasar.



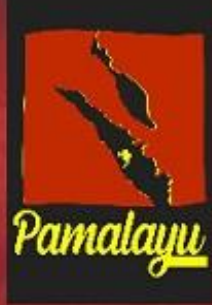
Faktor Pendukung Pencapaian

Sumber: Diskumprdag Dharmasraya; 2020



Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan 17 Program dengan 42 Kegiatan untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat. Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran ini dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 36.738.784.750,- terealisasi Rp 32.102.672.665,- (87,381 persen). Sementara capaian kinerja dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat efisien.

BIDANG SOSIAL BUDAYA



Meningkatnya
Kualitas Birokrasi
Pemerintahan

Indikator

1. Hasil Evaluasi AKIP
(T:B / R: B)
Capaian 100%
2. Nilai LPPD
(T:3,275 /R : 3,4404)
Capaian :105%

MEAN 92,5
KATEGORI
SANGAT BERHASIL

MEAN 92,5
KATEGORI
SANGAT BERHASIL

Indikator

1. Persese capaian RPJMD
(T:90% / R: 102,8%)
Capaian 114,2%
2. Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan (T: WTP /R : WTP)
Capaian :100%

Meningkatnya
efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan
pembangunan

Meningkatkan status
pembangunan
nagari

Indikator

- Persentase nagari
tertinggal dan sangat
tertinggal
(T: 19,23% / R: 23,07)
Capaian : 80,03%

MEAN 77,5
KATEGORI
BERHASIL

MEAN 92,5
KATEGORI
SANGAT BERHASIL

Indikator

1. Jumlah Grup Kesenian Daerah yg
dilestarikan
(T:30 / R: 30)
Capaian 100%
2. % Lembaga adat aktif (T: 100%
/R : 100%) Capaian 105%
3. Jumlah Cagar Budaya yg
dilestarikan
(T:11/ R: 11) Capaian 100%

Meningkatnya
pelestarian
Budaya Daerah

bidang Sosial Budaya ditetapkan 4 sasaran dengan 8 indikator, dari 4, 3 diantaranya mencapai prediket **Sangat Berhasil** dengan mean **92,5**, dan 1 sasaran mendapat prediket **berhasil** dengan mean **77,5** sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Bidang Sosial Budaya yang menjadi identitas Kabupaten Dharmasraya.

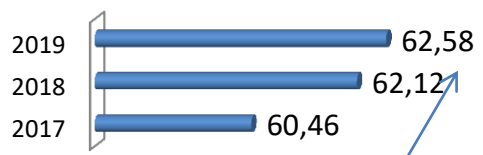


Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pemerintahan

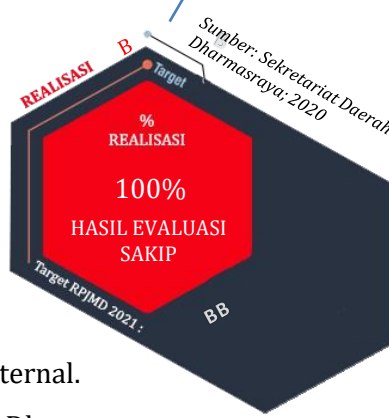
Sasaran Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Hasil Evaluasi AKIP dan Nilai LPPD, dari kedua indikator tersebut, didapatkan nilai rata-rata tertimbang sebesar 102,5 dengan nilai Mean 92,5 dan termasuk kedalam kategori **Sangat Berhasil**

1. Hasil Evaluasi AKIP

Pada tahun 2019 hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Dharmasraya ditargetkan mendapat predikat B. Target tersebut tercapai 100 persen.



Meskipun capaian hasil evaluasi AKIP telah mencapai target, namun, dalam tiga tahun terakhir belum ada peningkatan capaian nilai evaluasi AKIP Kabupaten Dharmasraya.



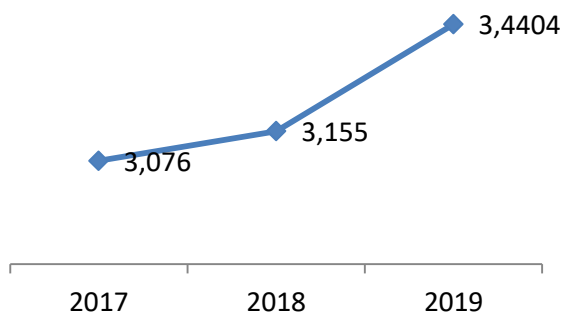
Keberhasilan mencapai target tersebut didukung oleh makin baiknya kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja. Selain itu ada keselarasan antar dokumen perencanaan baik daerah maupun OPD. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan juga ditingkatkan melalui evaluasi internal.

Khusus hasil evaluasi AKIP ini, predikat yang diperoleh Kabupaten Dharmasraya masih dibawah perolehan provinsi yang mendapat nilai (BB). Ini berarti, meski capaian nilai AKIP sangat baik, namun ke depan Pemkab Dharmasraya harus terus melakukan perbaikan dalam penerapan SAKIP, supaya bisa mendapatkan nilai terbaik.

2. Nilai LPPD

Pada tahun 2019 telah disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018. Hasil laporan yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan telah dievaluasi oleh Tim EKPPD Provinsi dan Nasional. Hasil evaluasi LPPD di tahun 2018 ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari angka 3,1856 di tahun 2017 menjadi inovasi lainnya.

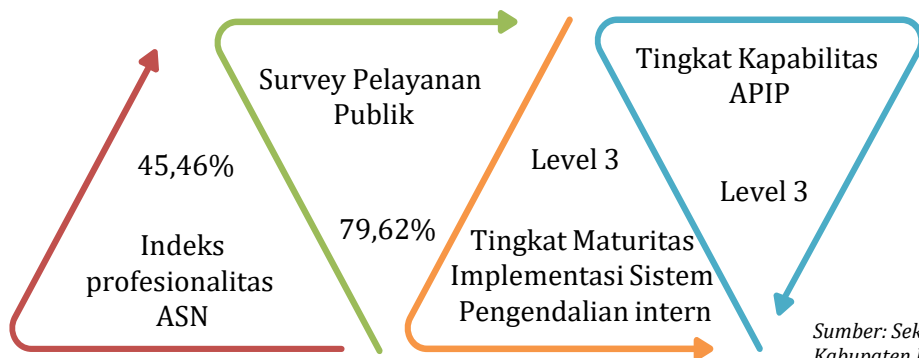
LPPD



Nilai ini meningkat menjadi 3,4404 di tahun 2018 dengan status sangat tinggi (peringkat I di Provinsi Sumatera Barat). Kenaikan tersebut terjadi karena untuk penyusunan tahun 2018 disertai dengan data-data pendukung yang lengkap.

Nilai terhadap Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim EKPPD Daerah dan Nasional dan kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

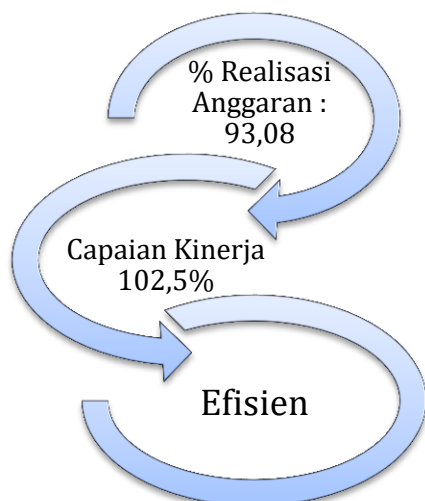
Peningkatan nilai LPPD ini, karena didukung oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya sumberdaya aparatur, dan makin lengkapnya fasilitas daerah serta adanya berbagai inovasi diantaranya mobil capil keliling, donor darah keliling dan berbagai



Faktor yang Pendukung Keberhasilan

Sumber: Sekretariat Daerah, BPPSDM dan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya; 2020

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 29 Program dan 741 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 171.503.901.489,-



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pemerintahan dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 171.503.901.489,- terealisasi Rp 159.630.721.185,- (93,077 persen). Sementara capaian kinerja dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat efisien.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran ini dengan efisien

Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Pembangunan



Sasaran efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase capaian RPJMD (IKU Daerah) dengan capaian 114,2 dan OPINI BPK terhadap laporan keuangan dengan capaian 100%. Dari ke 2 (dua) indikator ini, didapatkan rata-rata capaian sasaran 107,11 dengan kategori **Sangat Berhasil** dan Nilai **Mean 92,5**

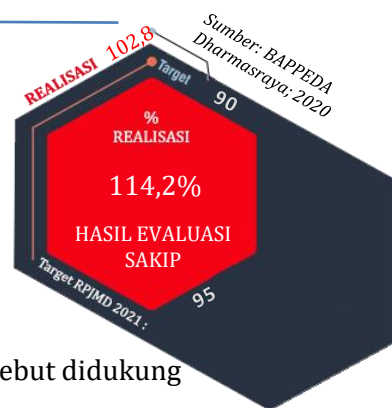
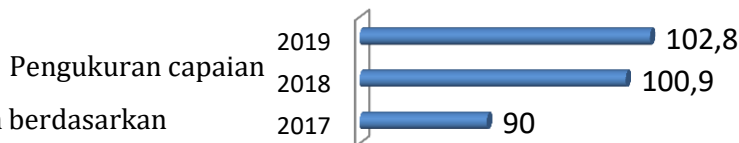
1. Capaian RPJMD (IKU Daerah)

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu bagian yang ingin diwujudkan. Salah satu ukurannya adalah persentase capaian RPJMD. Pada tahun 2019, persentase capaian RPJMD sebesar 102,8 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 90 persen dengan capaian sebesar 114,22%.

Pengukuran capaian RPJMD dihitung berdasarkan rata-rata capaian dari seluruh sasaran indikator yang dicapai dalam indikator kinerja utama daerah, dari 15 sasaran dan 27 Indikator yang ditetapkan, didapatkan rata-rata capaian yang didapatkan sebesar 102,8%

Capaian tersebut itu dinilai sangat berhasil dan terus mengalami peningkatan dalam hal poin yang didapat dalam tiga tahun terakhir. Prestasi tersebut didukung dengan adanya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan dan juga komitmen pimpinan daerah dan kepala OPD yang tinggi untuk mewujudkan target dan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Mantapnya koordinasi antar unit kerja, membaiknya kualitas sumberdaya aparatur, adanya inovasi teknologi informasi telah memungkinkan adanya percepatan terhadap realisasi pembangunan sesuai dengan pentahapan yang telah ditetapkan. Dan juga makin lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah telah mendorong adanya percepatan realisasi RPJMD setiap tahunnya.



2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Sementara itu, untuk indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan yang ditergetkan memperoleh opini WTP dapat direalisasi sesuai yang ditargetkan (100 persen).

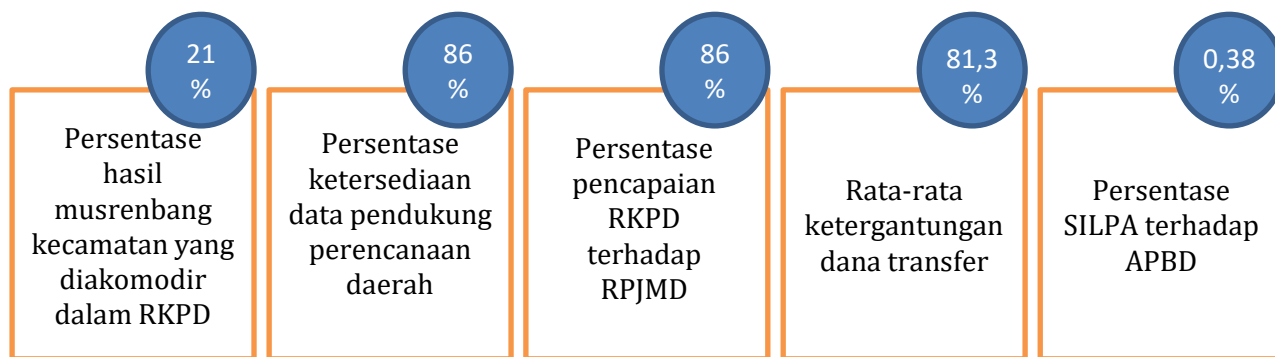
Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Kabupaten Dharmasraya dapat mempertahankan opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan prediket WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Hal tersebut didukung oleh komitmen yang sangat tinggi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan seluruh peraturan yang menyangkut dengan akuntansi pemerintah. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan dengan memenuhi standar akuntansi pemerintah.

Ini dimungkinkan karena pemerintah daerah terus mendorong aparatur sipil negara untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan terkait dengan akuntansi keuangan. Pemerintah daerah mendorong adanya proses belajar bagi aparatur sipil negara untuk terus mengasah kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan agar pengelolaan keuangan benar benar memenuhi standar akuntansi negara.

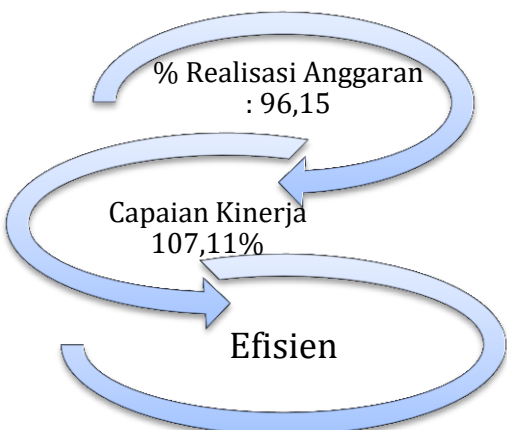


Faktor yang Pendukung Keberhasilan



Sumber: BAPPPEDA dan BKD Dharmasraya; 2020

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 7 Program dan 41 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.215.237.460,-



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Pembangunan dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 7.215.237.460,- terealisasi Rp 6.937.163.197,- (96,146 persen). Sementara capaian kinerja dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat efisien.

Meningkatnya status Pembangunan Nagari



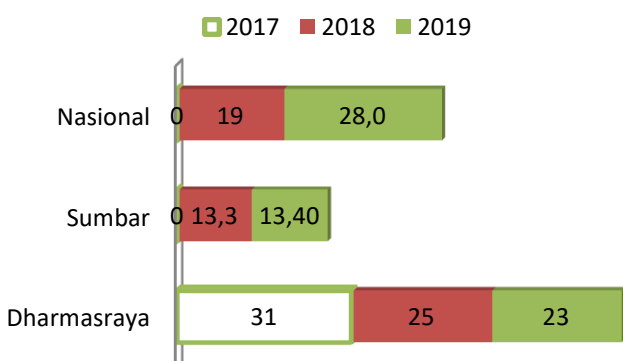
Indikator Persentase Nagari Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Keberhasilan pembangunan nagari ini dapat dilihat dari persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal. Pada tahun 2019 persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal ditarget 19,23 persen. Target tersebut bisa dicapai 22,07 persen. Ini berarti target yang ditetapkan tidak tercapai atau hanya mampu direalisasi 80,03 persen

kekurang berhasil ini disebabkan karena salah satu indikator terkait ketahanan lingkungan dari indeks desa membangun. Adapun indikator ketahanan lingkungan yang masih rendah adalah tentang persampahan dan masih adanya masyarakat yang buang air besar sembarangan.

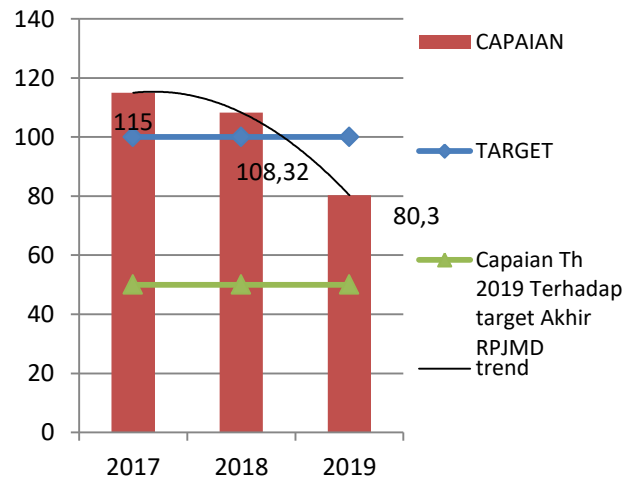
Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 25% atau 13 Nagari dan Tahun 2019 sebesar 23,07 atau 12 nagari, maka tahun ini mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,93% atau 1 Nagari yang terlepas dari daerah tertinggal.

Capaian % Nagari Tertinggal dibandingkan Provinsi dan Nasional

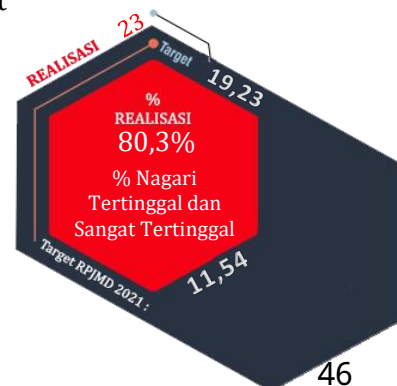


Sumber: Dinas PMD Dharmasraya; 2020

Persentase nagari Tertinggal dan sangat tertinggal Tahun 2017-2019



Dibandingkan target capaian RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021 sebesar 11,54 % ditahun 2021, maka terlihat bahwa capaian indikator Persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal masih di angka 50 %.



Jika dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi, persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Dharmasraya masih di bawah Provinsi Sumatera Barat, Namun sudah diatas angka Nasional dimana persentase nagari tertinggal di Sumatera barat sebesar 13,04 persen dan Nasional sebesar 28,12

Ke depan upaya pembangunan nagari harus terus ditingkatkan, mengingat secara kuantitas, persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal masih besar angkanya. Perlu ada upaya yang lebih intensif dan terobosan segar dalam memberdayakan dan membangun nagari.

Masalah yang dihadapi pada umumnya minimnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan, masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai tempat buang besar dan belum adanya tempat pembuangan sampah yang terkoordinir.



Keberhasilan pencapaian sasaran Status Pembangunan Nagari di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dhamasraya menetapkan 6 Program dan 36 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.645.856.450



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Status Pembangunan Nagari dinilai Kurang Efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 9.645.856.450,- terealisasi Rp 7.962.663.511,- (82,550 persen). Sementara capaian kinerja yang dihasilkan dengan realisasi anggaran tersebut sebesar 80,03%. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini dapat dinilai kurang efisien, sehingga butuh pengkajian kembali tentang program dan kegiatan dalam mencapai sasaran tersebut



Sasaran Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah

Sasaran meningkatnya pelestarian budaya daerah diukur dengan 3 indikator antara Persentase lembaga adat yang aktif dengan capaian 100%, jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan capaian 100% dan jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan dengan capaian 100%.

Rata-rata capaian sasaran meningkatnya pelestarian budaya daerah sebesar 100% dengan Kategori **Sangat Berhasil** dan **Mean 92,5**,

1. Jumlah Group Kesenian Daerah yang dilestariakan

Jumlah Kesenian Daerah yang dilestariakan ditargetkan sebesar 30 group. Jumlah tersebut dapat direalisasikan sebanyak 30 group dengan capaian 100 persen. Tercapainya target tersebut dipicu oleh keberhasilan berbagai program yang diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya. Salah satu program yang sukses adalah adanya event event yang memperlombakan penampilan aneka kesenian daerah.

Dari sasaran meningkatnya pelestarian budaya daerah yang didukung tiga indikator diperoleh nilai mean sebesar 92,5 atau dengan kategori sangat berhasil.



Sumber: Disbudparpora Dharmasraya; 2020

2. Persentase lembaga adat yang aktif

Target persentase lembaga adat yang aktif pada tahun 2019 adalah 100 persen. Tercapai sebesar 100 persen dan capaiannya juga 100 persen. Ini berarti lembaga adat di Kabupaten Dharmasraya dalam kondisi aktif.

Faktor yang mendorong aktif dan tidaknya lembaga adat adalah pengelolaan, pendanaan dan juga dukungan masyarakat. Pemkab Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran untuk insentif para pemangku adat. Selain itu, juga memberikan peran dan ruang bagi lembaga adat untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.



Sumber: Disbudparpora Dharmasraya; 2020

Meskipun telah dinilai sangat berhasil, namun ke depan Pemkab Dharmasraya harus lebih akomodatif lagi terhadap lembaga adat, terutama dalam ikut serta melastariakan budaya dan tradisi serta penerapan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya.



3. Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan

Pada tahun 2019, Pemkab Dharmasraya menargetkan cagar budaya yang ditetapkan sebanyak 11 unit, dan tercapai 11 unit dengan capaian 100%. Seluruh unit cagar budaya yang ditetapkan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Dharmasraya untuk menjadi cagar budaya yang dilestarikan pemerintah daerah.

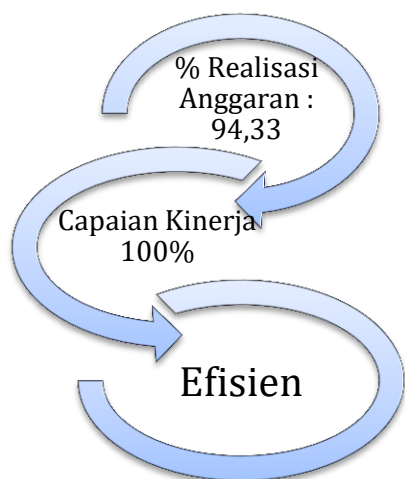


Sumber: Disbudparpora Dharmasraya, 2020

Pencapaian tersebut dapat terlaksa atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Kebudayaan, bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat di Batusangkar dan Balai Arkeologi Sumatera Utara di Medan. dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bidang Kebudayaan hanya sebagai Pendamping kegiatan yang dilakukan tersebut. Hal dikarekan oleh tingginya Biaya Ekskavasi yang dibutuhkan belum terakomodir oleh pemerintah daerah.

Ke depan, Pemkab Dharmasraya harus membangun kerjasama dengan lembaga - lembaga kepurbakalaan agar dapat membantu menetapkan cagar budaya dan melestarikannya untuk keperluan wisata, penelitian dan juga pembelajaran (education).

Keberhasilan pencapaian sasaran Pelestarian Budaya Daerah di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dhamasraya telah menetapkan 6 Program dan 14 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.723.677.950,-



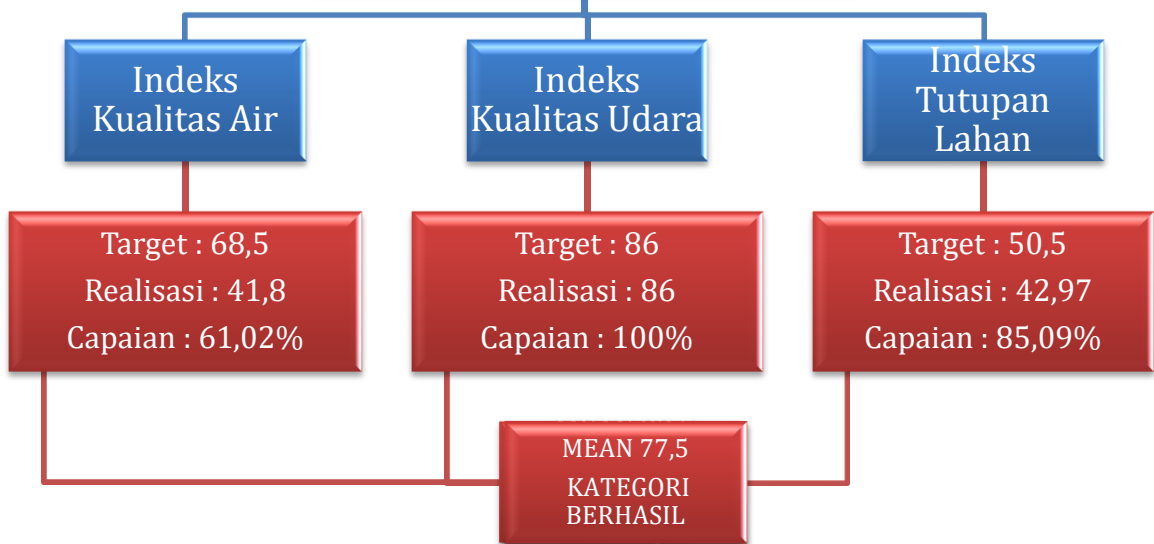
Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 4.575.733.200,- terealisasi Rp 4.315.356.835,- (94,330 persen). Sementara capaian kinerja yang dihasilkan dari realisasi anggaran tersebut sebesar 100%. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat efisien.

4. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP



BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya kualitas mutu air, udara dan tutupan lahan



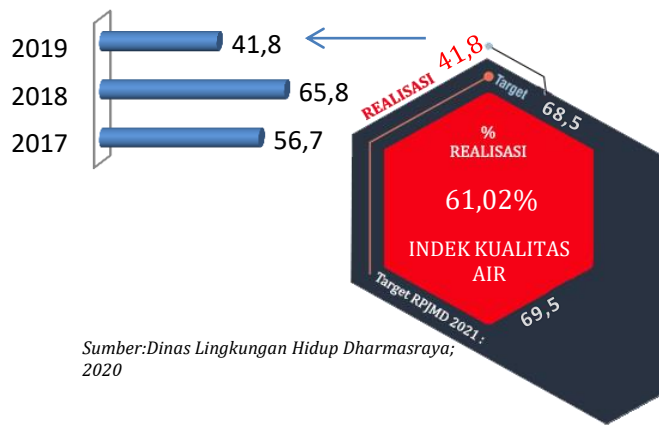
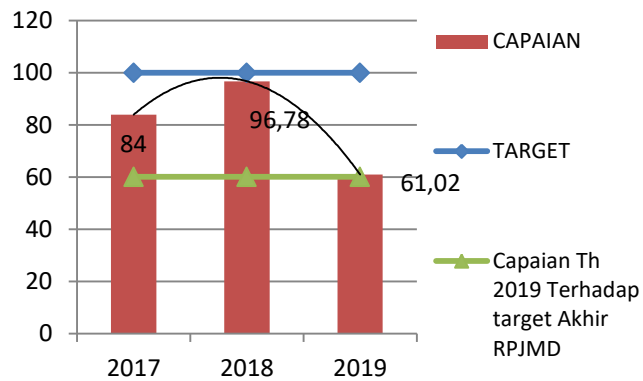
Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pada bidang Lingkungan Hidup ditetapkan 1 sasaran dengan 3 indikator, rata-rata capaian dari ketiga indikator tersebut seberas 82,04 dengan Kategori **Berhasil** dan nilai Mean **77,5**. Pencapaian bidang lingkungan hidup yang belum maksimal memaksa Pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan dan fokus menangani masalah lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya terutama peningkatan indeks kualitas air.

1. Indikator Indeks Kualitas Air

Pada tahun 2019, indeks kualitas air Kabupaten Dharmasraya ditargetkan 68,5. dari target tersebut hanya dapat direalisasi 41,8 atau dengan capaian 61,02 persen. Hal itu disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan perairan. Bahkan masih banyak masyarakat yang melaksanakan usaha sehingga mengakibatkan terganggunya kualitas air.

Peningkatan indeks kualitas air memang sangat sulit dilakukan, dalam tiga tahun terakhir, trend indeks kualitas air naik dan kemudian turun (fluktuatif). Oleh karena itu perlu upaya Pemkab Dharmasraya untuk terus meningkatkan indeks kualitas air, seperti melakukan konservasi perairan dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perairan. Dengan demikian lingkungan perairan menjadi kembali baik untuk mendukung kehidupan.

Indeks Kualitas Air Tahun 2017-2019



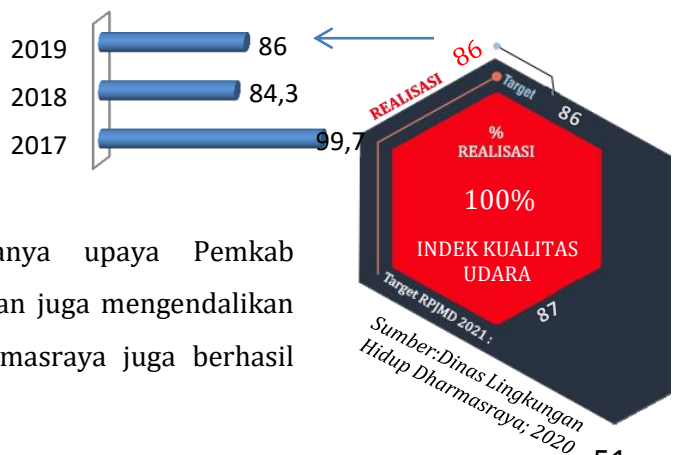
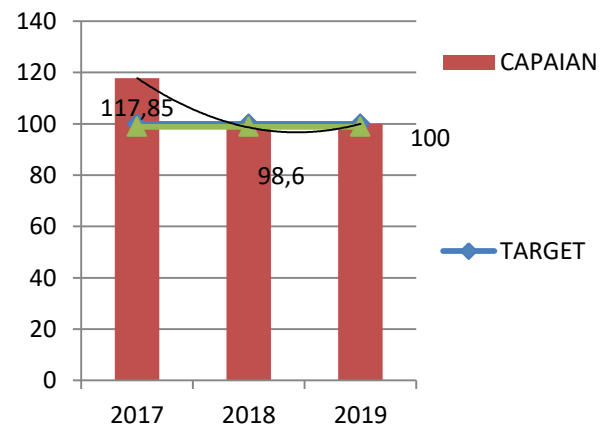
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya; 2020

2. Indikator Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 ditargetkan 86 dan tercapai sebesar 86. ini berarti capaiannya 100 persen atau sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian RPJMD, Kabupaten Dharmasraya hanya mengejarkan beberapa poin lagi untuk menjamin kualitas udara di Kabupaten Dharmasraya

Untuk Pemantauan Kualitas Udara Ambien terdiri dari 11 titik pantau yang tersebar di tiap kecamatan. Pemeriksaan Indeks kualitas udara didapatkan dengan komposisi 30 persen dari IKA ditambah 40 persen ITL dan 30 persen dari IKU atau IKA 12.55 ditambah ITL 17,16 ditambah IKU 25,80 .

Indeks Kualitas Udara Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya; 2020

Keberhasilan ini didukung oleh adanya upaya Pemkab Dharmasraya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan juga mengendalikan sumber-sumber polusi udara. Selain itu, Pemkab Dharmasraya juga berhasil dalam kegiatan menanam pohon.

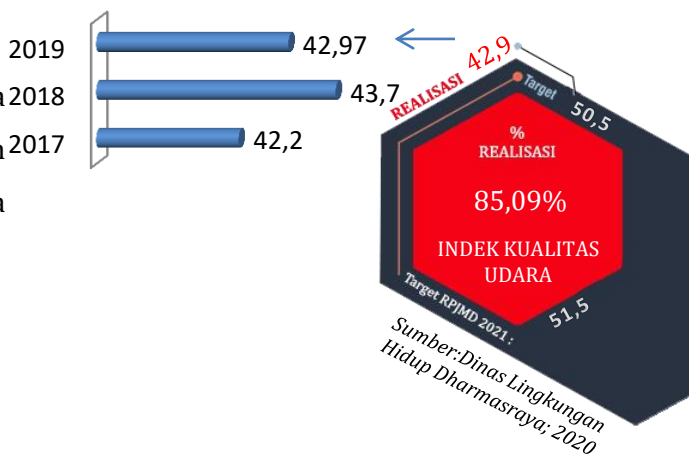
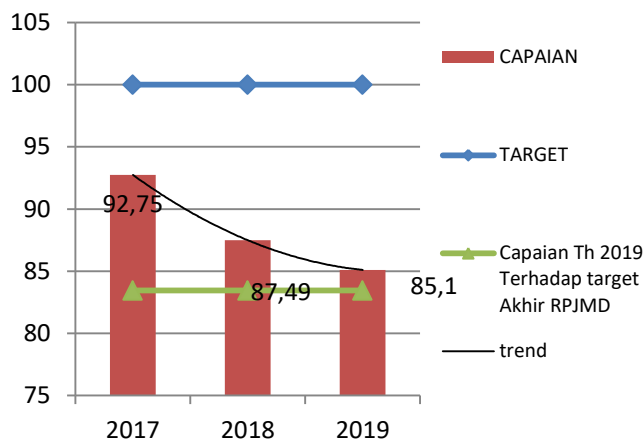
3. Indikator Indeks Tutupan Lahan

Pada tahun 2019, indeks tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya ditarget 50,5. target tersebut hanya terealisasi 42,97 dengan capaian 85,09. Capaian tahun 2019 merupakan capaian terendah selama 3 tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masih banyaknya masyarakat yang melakukan penebangan hutan.

Upaya Pemkab Dharmasraya untuk melaksanakan kegiatan penanaman pohon, meski berhasil namun tidak secepat laju perusakan hutan. Adanya program perluasan pertanian dan perkebunan juga ikut menyumbang terhadap masalah tersebut.

Oleh karena itu ke depan Dharmasraya 2018 harus lebih giat lagi melaksanakan reboisasi dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, supaya indeks tutupan lahan makin baik.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2017-2019



Faktor yang Mempengaruhi

59,17%

Persentase timbulan sampah yang tertangani

4,8 Ha

Jumlah kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi

4,8 Ha

Jumlah kawasan Sumber Daya Lahan yang harus dilindungi

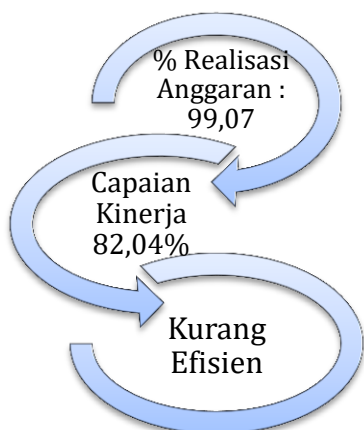
4,8 Ha

Persentase menurunnya lahan kritis

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya; 2020

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas mutu air, udara dan tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan 6 Program dan 23 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.737.554.910,-

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Mutu Air, Udara dan Tutupan Lahan dinilai efisien. Dari jumlah anggaran yang disediakan Rp 2.737.554.910,- terealisasi Rp 2.712.223.905,- (99,075 persen). Sementara capaian kinerja dalam katagori sangat berhasil. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka akuntabilitas keuangan pada pencapaian sasaran ini mendapat predikat kurang efisien.



B. REALISASI ANGGARAN



Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

program	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.868.644.050	2.577.620.882	89,86
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	229.945.000	229.605.750	99,85
Program Pengawasan Obat dan Makanan	76.411.000	76.326.000	99,89
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	151.601.400	150.008.900	98,95
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	72.153.000	68.649.095	95,14
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	393.329.306	390.665.050	99,32
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.907.959.782	1.679.140.958	88,01
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	27.835.150	27.813.250	99,92
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	19.424.317.744	18.025.271.630	92,80
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	7.659.915.400	5.350.308.741	69,85
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	15.955.000	15.228.500	95,45
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.056.823.947	1.830.350.114	88,99
Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan Remaja	104.574.849	103.550.092	99,02
Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	1.916.000.000	1.075.663.981	56,14
Program Bantuan Operasional kesehatan	10.087.971.000	9.762.536.119	96,77
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	10.811.097.856	10.300.028.829	95,27
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	17.735.632.813	15.939.019.205	89,87
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	42.890.955.951	42.559.291.810	99,23
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	25.830.000	25.830.000	100,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	141.000.000	140.424.815	99,59
Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	46.450.000	46.416.500	99,93
TOTAL PERSASARAN	118.644.403.248	110.373.750.221	93,03

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

program	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	32.120.961.231	29.935.082.551	93,19
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.068.675.000	4.030.598.250	99,06
Program Pendidikan Anak Usia Dini	40.021.116.576	38.797.256.795	96,94
Program Pendidikan Non Formal	461.142.000	424.376.800	92,03
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.199.739.000	5.642.803.091	91,02
Program Pendidikan Kedinasan *)	267.590.400	266.332.498	99,53
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	284.011.850	279.829.350	98,53
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	120.321.500	118.183.419	98,22
Program Pembinaan dan Permasalahatan Olah Raga	3.584.299.500	3.572.876.603	99,68
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	25.164.000	20.686.700	82,21
TOTAL PERSASARAN	87.153.021.057	83.088.026.057	95,34

Meningkatnya ketahanan pangan

program	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Program pengembangan kawasan budidaya perikanan	1.715.836.498	1.700.725.500	99,12
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	250.197.750	226.240.686	90,42
Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan	135.334.600	135.081.650	99,81
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	47.360.850	46.647.550	98,49
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	266.605.000	257.473.500	96,57
TOTAL PERSASARAN	2.415.334.698	2.366.168.886	97,96

Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak

program	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1.338.061.000	1.319.272.440	98,60
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	110.415.000	108.949.500	98,67
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	629.885.900	622.946.489	98,90
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	128.240.000	122.695.232	95,68
Program Keluarga Berencana	3.851.172.650	3.746.481.383	97,28
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	116.020.916	25.239.500	21,75
Program peningkatan peran serta kepemudaan	335.270.500	303.465.550	90,51
Program peningkatan pendidikan politik masyarakat	117.793.000	113.542.100	96,39
Program pengembangan wawasan kebangsaan	3.195.738.100	3.192.378.972	99,89
TOTAL PERSASARAN	9.822.597.066	9.554.971.166	97,28

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
pembangunan jalan dan jembatan	48.712.699.411	48.103.210.142	98,75
pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.802.200.000	2.606.203.500	93,01
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	3.646.750.000	3.606.691.000	98,90
peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.437.550.000	1.417.622.750	98,61
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	6.011.666.700	5.522.548.285	91,86
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.189.002.450	1.183.343.575	99,52
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	169.373.850	32.146.000	18,98
peningkatan pelayanan angkutan	116.456.000	106.003.750	91,02
pengendalian dan pengamanan lalu lintas	105.496.650	105.112.750	99,64
TOTAL PERSASARAN	64.191.195.061	62.682.881.751	97,65

Meningkatnya kualitas perumahan

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Pengembangan Perumahan	1.017.777.500	958.713.904	94,20
Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.967.114.000	2.951.208.960	99,46
penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	160.155.000	157.310.994	98,22
penyelesaian konflik-konflik pertanahan	109.207.000	94.570.400	86,60
peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	972.839.000	887.802.468	91,26
pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	60.697.000	58.974.800	97,16
Pengembangan Tata Ruang	840.350.000	297.549.129	35,41
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6.496.487.500	6.272.188.396	96,55
perencanaan kota-kota menengah dan besar	42.073.000	41.198.953	97,92
TOTAL PERSASARAN	12.666.700.000	11.719.518.004	92,52

Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	10.824.624.444	10.256.193.664	94,75
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	51.248.900	50.561.900	98,66
TOTAL PERSASARAN	10.875.873.344	10.306.755.564	94,77

Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Peningkatan Kesejahteraan Petani	292.068.700	286.780.297	98,19
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	550.472.400	547.251.150	99,41
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	5.362.870.200	5.226.712.128	97,46
pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	2.001.845.500	1.842.963.584	92,06
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	415.772.000	413.558.812	99,47
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.091.420.400	1.039.293.504	95,22
Pengembangan Agribisnis Pertanian	102.771.700	100.510.750	97,80
Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Peternakan/Perkebunan	906.457.050	892.269.650	98,43
TOTAL PERSASARAN	10.723.677.950	10.349.339.875	96,51

Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
peningkatan daya saing koperasi dan UKM	575.803.000	555.727.526	96,51
Penguatan Kelembagaan Koperasi	28.630.500	26.407.750	92,24
perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	133.444.000	132.745.942	99,48
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	3.650.974.000	3.195.171.781	87,52
pengembangan perdagangan	67.654.000	67.036.900	99,09
pengembangan industri kecil dan menengah	30.379.541.000	26.400.220.095	86,90
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	156.739.000	140.562.787	89,68
perencanaan pembangunan ekonomi	217.170.200	214.727.200	98,88
pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif	10.260.250	9.132.000	89,00
Peningkatan Kesempatan Kerja	313.864.250	288.999.838	92,08
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	71.474.950	39.285.150	54,96
Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	402.826.500	386.542.900	95,96
Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi	118.363.650	51.486.464	43,50
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	207.880.350	204.071.500	98,17
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	284.225.600	276.049.350	97,12
Peningkatan Perlindungan Konsumen	83.242.500	77.814.482	93,48
pengembangan promosi dan kerja sama investasi	36.691.000	36.691.000	100,00
TOTAL PERSASARAN	36.738.784.750	32.102.672.665	87,38

Menurunnya Tingkat Kemiskinan

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	331.481.500	330.908.750	99,83
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	146.605.000	145.980.000	99,57
Lainnya			
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	374.055.200	370.153.868	98,96
Perlindungan dan Jaminan Sosial	135.846.450	135.511.150	99,75
TOTAL PERSASARAN	987.988.150	982.553.768	99,45

Meningkatnya kualitas mutu air, udara dan tutupan lahan

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	583.212.900	573.666.651	98,36
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	425.262.600	415.387.000	97,68
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	581.900.100	577.355.774	99,22
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	165.313.250	164.358.302	99,42
pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	29.677.900	29.638.179	99,87
Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	952.188.160	951.818.000	99,96
TOTAL PERSASARAN	2.737.554.910	2.712.223.906	99,07

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
perencanaan sosial dan budaya	412.277.500	407.736.816	98,90
Pengembangan Wilayah	136.236.600	136.091.736	99,89
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.857.077.860	3.678.665.331	95,37
perencanaan pembangunan daerah	2.069.046.200	2.051.156.171	99,14
Perencanaan Tata ruang	685.202.300	608.630.243	88,82
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.975.000	21.460.900	97,66
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.422.000	33.422.000	100,00
TOTAL PERSASARAN	7.215.237.460	6.937.163.197	96,15

Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*)	29.057.500	29.057.500	100,00
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	756.798.850	730.328.649	96,50
Penataan Daerah Otonomi Baru	298.227.200	297.920.549	99,90
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan *)	78.367.500	78.365.926	100,00
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	143.690.000	143.650.096	99,97
Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	24.438.000	24.355.500	99,66
Pelayanan Administrasi Perkantoran	64.557.504.704	62.658.731.945	97,06
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69.700.248.785	61.671.092.319	88,48
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.405.432.450	2.151.131.282	89,43
peningkatan disiplin aparatur	1.243.746.400	1.218.235.575	97,95
Pelaksanaan Pembangunan Daerah	586.092.000	585.807.189	99,95
peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	357.296.050	335.399.573	93,87
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.007.820.000	3.964.604.192	98,92
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur *)	1.126.646.600	932.512.197	82,77
perbaikan sistem administrasi kearsipan	127.935.000	127.837.750	99,92
penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	85.283.000	85.195.500	99,90
pengembangan data/informasi	36.563.200	35.515.700	97,14
Penataan Administrasi Kependudukan	1.467.760.000	1.450.641.003	98,83
peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.124.195.350	1.101.986.359	98,02
peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	62.770.000	60.750.471	96,78
fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	64.058.500	62.611.000	97,74
kerjasama informasi dengan mas media	97.500.000	96.593.373	99,07
pengembangan data/informasi/statistik daerah	207.485.000	206.910.946	99,72
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah	98.820.000	95.747.405	96,89
Persandian Daerah	5.700.000	5.554.250	97,44
Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	14.099.500	2.683.500	19,03
peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	5.190.141.900	5.188.830.122	99,97
Optimalisasi Lelang terpadu	1.056.392.500	1.050.133.517	99,41
peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	16.549.831.500	15.238.537.797	92,08
TOTAL PERSASARAN	171.503.901.489	159.630.721.185	93,08

Meningkatkan status pembangunan nagari

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	693.686.050	690.524.115	99,54
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	37.343.250	36.567.000	97,92
penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	988.083.850	987.189.146	99,91
Pengembangan Wilayah Tertinggal	137.336.000	17.033.200	12,40
pembangunan infrastruktur perdesaan	7.671.850.000	6.114.360.450	79,70
penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	117.557.300	116.989.600	99,52
TOTAL PERSASARAN	9.645.856.450	7.962.663.511	82,55

Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah

PROGRAM	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	%
Pengembangan Nilai Budaya	148.093.250	148.069.250	99,98
Pengelolaan Kekayaan Budaya	159.385.000	159.302.746	99,95
Pengelolaan Keragaman Budaya	1.522.305.000	1.463.225.155	96,12
Pengembangan dan Pelestarian Budaya	74.169.000	72.474.000	97,71
pengembangan pemasaran pariwisata	717.043.950	710.371.515	99,07
pengembangan destinasi pariwisata	1.953.737.000	1.761.914.169	90,18
TOTAL PERSASARAN	4.574.733.200	4.315.356.835	94,33

TOTAL KESELURUHAN

549.896.858.833

515.084.766.591

93,67

C. EFEKTIFITAS PEGAWAI

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Dharmasraya saat ini berjumlah 3.596 orang, sedangkan kebutuhan pegawai sesuai dengan perhitungan Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK), untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik, Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya membutuhkan 7.420 pegawai, hal ini berarti pegawai di Dharmasraya belum sampai setengah dari yang dibutuhkan.

Namun, kinerja pegawai saat ini telah mencapai hasil yang secara garis besar sangat berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan tugas dengan sangat efektif, bahkan melebihi beban kerja yang seharusnya.

Berkat efektifitas kinerja pegawai ini, Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya telah mengefisienkan anggaran Rp.58.277.760.000,- selama setahun untuk pemberian tunjangan daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mengefisienkan minimal Rp. 92.794.713.600 untuk gaji yang berasal dari dana alokasi umum, sehingga total efisiensi anggaran yang diperoleh dari Efektifitas kinerja pegawai sebesar Rp. 151.072.473.600,-

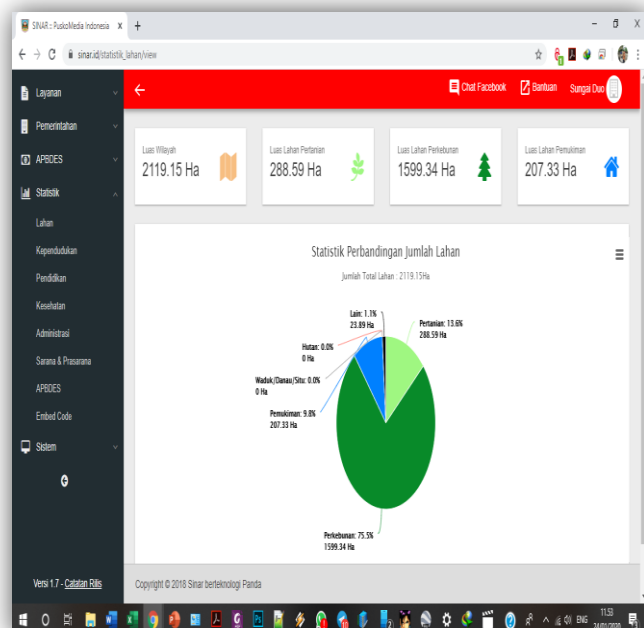
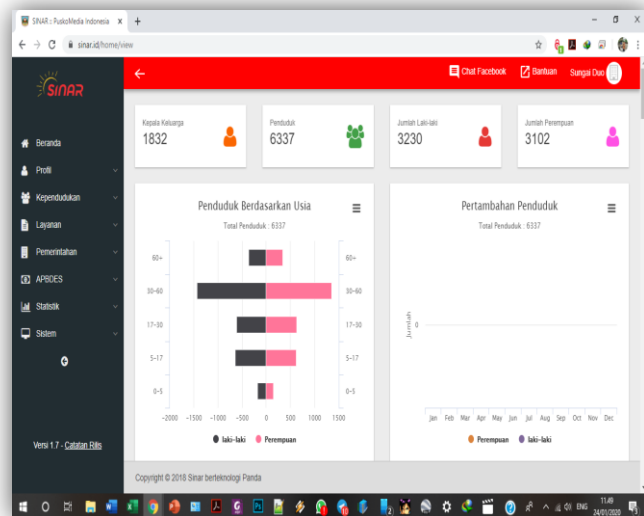
D - Sentuhan Inovasi Daerah

Paradigma pembangunan yang terus berkembang dan adanya keterbatasan menjadi tantangan pemerintah dalam pembangunan, hal tersebut menuntut Pemda Dharmasraya selalu melakukan langkah strategis berupa melakukan langkah strategis berupa inovasi-inovasi dalam melaksanakan pembangunan supaya layanan Pemda Dharamsraya kepada masyarakat menjadi maksimal. Komitmen Pemda yang tinggi ditunjukkan dengan memunculkan inovasi-inovasi dalam bentuk kebijakan maupun teknis operasional

Nagari Statistik

Nagari statistik adalah bentuk implementasi dari apa yang disebut dukungan data statistik yang akurat, terintegrasi, cepat dan mudah diakses. Adapun tujuan dari pembentukan nagari statistik adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan akurasi data kewilayahan dalam rangka mendukung penentuan arah kebijakan pembangunan, terutama saat ini untuk pemerintahan nagari sendiri. Adapun sasaran yang akan dituju dalam pelaksanaan nagari statistik adalah untuk meningkatkan ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan kebijakan pembangunan, maupun untuk dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan nagari sendiri serta nantinya juga akan dimanfaatkan pemerintah kabupaten baik secara sektoral dan maupun kewilayahan

Dampak yang diharapkan adalah semakin baiknya manajemen pemerintah nagari sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, hal ini diharapkan dapat mendukung sasaran strategis ke 12 yaitu **Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan**



Germas Zone

GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup



Germas Zone adalah Inovasi atau pengembangan dari kegiatan GERMAS yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, Kegiatan Germas zone mengintegrasikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tempat.

Jika dianalogikan, kegiatan germas seperti kegiatan *Car Free Day* yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan secara gratis, penyuluhan kesehatan, pemberian vitamin dan suplemen tambah darah, makan buah dan sayur, senam bersama, demonstrasi CTPS dan demonstrasi gosok gigi yang benar, promosi perilaku hidup bersih dan sehat, serta terintegrasi dengan kegiatan yang lain yang mendukung kesehatan masyarakat seperti promosi pariwisata, pelestarian budaya serta, pelestarian permainan anak nagari yang dicanangkan oleh OPD terkait.

Germas Zone ini bertujuan mendekatkan masyarakat dengan pelayanan kesehatan, serta menciptakan kesadaran serta kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya sehingga dapat menurunkan beban penyakit, menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan, meningkatkan produktivitas penduduk, dan menekan peningkatan beban finansial masyarakat untuk pengeluaran kesehatan.

Dari inovasi Germas Zone ini, diharapkan dapat mendukung sasaran strategis Pemerintah Daerah yang ke-1 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat serta mendukung pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati ke-1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 15 (Lima Belas) sasaran dan didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, sehingga rata-rata capaian Kinerja Pemerintah Daerah tercapai sebesar **104,62 %** dengan kategori **Sangat Berhasil dengan Nilai Mean 92,5**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 15 sasaran strategis, disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) sasaran strategis dikategorikan sangat berhasil dengan nilai Mean 92,5 , dan 2 (dua) sasaran strategis dengan hasil Berhasil dengan perolehan nilai capaian 77,5.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran, tentunya bukan hanya keberhasilan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya semata, tetapi berkat adanya partisipasi bersama dari dunia usaha, masyarakat, serta *civil society* secara umum. Pencapaian kinerja yang sudah lebih baik ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah untuk memfokuskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019.
- b. Komitmen bersama antara Bupati, DPRD dan seluruh Kepala SKPD untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional guna menghadirkan *good and clean governance* guna meraih Dharmasraya yang mandiri dan berbudaya.

Menindaklanjuti isu-isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2019, maka langkah –langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Menjadikan capaian kinerja tahun 2019 sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan perencanaan kinerja pada tahun yang akan datang dengan mengalokasikan anggaran memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan memiliki daya ungkit menunjang pencapaian target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.
- b. Menyelaraskan antara indikator kinerja pendukung yang ada di SKPD dengan indikator kinerja Pemerintah Daerah untuk memudahkan dalam pengukuran pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dengan pengawasan dan monitoring memperkuat kematangan sistem pengendalian interim pemerintah.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum atau tidak memenuhi target, kami menyadari semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KABUPATEN DHARMASRAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE
Jabatan : BUPATI DHARMASRAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pulau Punjung, 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	71,01
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,48
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,9
3	Meningkatnya ketahanan pangan	persentase Ketersediaan Kalori dan Protein per kapita	Persen	78,58
4	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,53
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	49,646
4	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	55,65
5	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	Persen	88,45
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	Persen	22,71
		Akses Sanitasi Layak	Persen	40,62
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	29,25
9	Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	20
		Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Unit	30
		Persentase IKM dengan peningkatan Omset	Persen	5,7
		Persentase Pasar dalam kondisi baik	Persen	25
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	6,17
11	Meningkatnya kualitas mutu air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	68,5
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	86
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	50,5
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)	Persen	90
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WD P/TW/disclaimer	WTP
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	Hasil evaluasi AKIP	Predikat/nilai	B
		Nilai LPPD	Predikat/nilai	3,2750 (tinggi) naik peringkat

14	Meningkatkan status pembangunan nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	19,23
15	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30
		Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	Persen	100
		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Unit	11

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 29.494.676.652
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 67.166.471.600
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 880.416.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 1.567.014.200
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 5.053.104.790
6	Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 710.088.650
7	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Rp. 17.961.123.850
8	Pendidikan Non Formal	Rp. 370.486.350
9	Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Rp. 6.857.380.300
10	Managemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 13.390.118.000
11	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 111.107.250
12	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Rp. 2.875.494.600
13	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Rp. 191.713.000
14	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 618.163.250
15	Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 370.992.000
16	Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 510.805.250
17	Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Rp. 1.724.124.000
18	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	Rp. 26.510.000
19	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rp. 74.122.750
20	Optimalisasi Lelang Terpadu	Rp. 990.000.000
21	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 85.163.500
22	Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah	Rp. 149.368.250
23	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Rp. 47.104.250
24	Peningkatan Kehidupan Beragama	Rp. 958.946.500
25	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 37.959.500
26	Pengembangan Promosi dan Kerja Investasi	Rp. 45.023.500
27	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 500.397.900
28	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 34.724.000
29	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 4.274.000.000
30	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Rp. 53.600.500
31	Pengembangan Data / Informasi	Rp. 86.437.000

32	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	42.747.500
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	462.211.600
34	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	126.168.500
35	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	3.602.368.960
36	Pengembangan Infrastruktur Perdesaan	Rp.	6.493.900.000
37	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.	47.026.137.000
38	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Rp.	1.964.700.000
39	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp.	3.062.450.000
40	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp.	1.447.950.000
41	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp.	5.129.594.600
42	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah	Rp.	10.780.979.500
43	Pengembangan Tata Ruang	Rp.	840.650.000
44	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp.	5.104.887.500
45	Program Perencanaan Tata Ruang		100.000.000
46	Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi		144.813.650
47	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	5.929.688.948
48	Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	496.870.700
49	Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	144.431.500
50	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	435.811.950
51	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	2.583.246.050
52	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	Rp.	2.297.303.300
53	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rp.	5.298.575.000
54	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Rp.	11.650.080.640
55	Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp.	297.119.000
56	Pengembangan lingkungan sehat	Rp.	492.663.200
57	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Rp.	590.842.000
58	Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin	Rp.	36.227.000
59	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rp.	86.796.250
60	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp.	393.471.200
61	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Rp.	10.332.942.950
62	Kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Rp.	163.050.250
63	Bantuan Operasional Kesehatan	Rp.	5.825.400.644
64	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	98.877.000
65	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	512.665.000
66	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	15.000.000

67	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	966.187.500
68	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp.	2.829.404.000
69	Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp.	130.000.000
70	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp.	83.000.000
71	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.	2.315.695.500
72	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	Rp.	28.103.500
73	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Rp.	2.031.448.000
74	Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rp.	280.942.500
75	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rp.	111.772.500
76	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Rp.	20.874.500
77	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social	Rp.	20.000.000
78	Perlindungan dan jaminan social	Rp.	135.016.000
79	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Rp.	79.086.000
80	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender&Anak	Rp.	165.695.000
81	Keluarga Berencana	Rp.	3.940.490.000
82	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Rp.	1.687.845.545
83	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	2.376.211.500
84	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.131.605.000
85	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.	45.026.000
86	Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp.	223.387.000
87	Perencanaan Pengembangan Kota2 Menengah dan Besar	Rp.	65.689.000
88	Perencanaan Tata Ruang	Rp.	515.879.000
89	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp.	87.264.000
90	Perencanaan Fisik dan Prasarana	Rp.	45.694.000
91	Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp.	96.684.000
92	Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.	1.257.392.000
93	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Rp.	655.365.500
94	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Rp.	44.795.000
95	Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM	Rp.	646.653.500
96	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	30.364.927.750
97	Pengembangan Perdagangan	Rp.	97.496.000
98	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp.	182.504.000
99	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Rp.	3.638.182.000

100	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp.	654.303.000
101	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp.	501.414.000
102	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp.	11.449.306.500
103	Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	Rp.	1.131.521.000
104	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rp.	630.595.015
105	Peningkatan produksi hasil peternakan	Rp.	969.784.500
106	Pengembangan Agribisnis Pertanian	Rp.	354.481.000
107	Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian/peternakan/perkebunan	Rp.	444.912.750
108	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu pertanian/perkebunan/peternakan secara berkelanjutan	Rp.	70.932.000
109	Peningkatan nilai tambah, daya saing,pemasaran dan produksi hasil pertanian	Rp.	90.231.000
110	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	77.435.000
111	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Rp.	212.170.000
112	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.	557.874.000
113	Pendidikan Kedinasan	Rp.	122.175.000
114	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Rp.	20.000.000
115	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Rp.	508.197.000
116	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp.	53.146.000
117	Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Rp.	36.828.500
118	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Rp.	136.466.400
119	Pengembangan Data /informasi Statistik Daerah	Rp.	183.318.900
120	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah	Rp.	122.917.000
121	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	125.356.500
122	Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.	301.522.000
123	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	80.151.000
124	Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja	Rp.	489.612.500
125	Pengembangan wilayah Transmigrasi	Rp.	140.751.500
126	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	2.270.212.000
127	Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp.	842.978.700
128	Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp.	1.427.414.000
129	Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp.	143.705.000

130	Pengembangan, Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan	Rp.	532.136.500
131	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Rp.	64.367.000
132	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Rp.	55.696.000
133	Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Rp.	89.289.500
134	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp.	65.003.050
135	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp.	67.192.000
136	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Rp.	11.820.000
137	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	125.599.500
138	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp.	169.712.000
139	Intensifikasi Penanganan Pengaduan	Rp.	19.572.500
140	Pengembangan Nilai Budaya	Rp.	144.368.500
141	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp.	217.170.000
142	Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp.	391.565.000
143	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp.	20.010.250
144	Pengembangan dan Pelestarian budaya	Rp.	167.586.250
145	Pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga	Rp.	456.855.000
146	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Rp.	382.550.000
147	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Rp.	498.383.500
148	Peningkatan peran serta kepemudaan	Rp.	100.000.000
149	Pengembangan pemasaran pariwisata	Rp.	863.902.000
150	Pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata	Rp.	1.252.086.000
151	Pengembangan kemitraan dan ekonomi kreatif	Rp.	90.016.000
152	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp.	2.173.817.000
153	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Rp.	461.271.650
154	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Rp.	89.895.100
155	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Rp.	120.059.950
156	Peningkatan pengendalian polusi	Rp.	9.505.000
157	Pengelolaan raung terbuka hijau (RTH)	Rp.	176.748.600
158	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp.	835.211.000
159	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp.	184.143.500
160	Peningkatan kapasitas aparaturn Pemerintah Desa	Rp.	31.373.000
161	Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	Rp.	670.650.000
162	Pemberdayaan kelembagaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya	Rp.	39.598.000
163	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	495.134.500
164	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp.	61.474.750

165	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp.	353.168.000
166	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp.	136.526.000
167	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp.	105.096.650
168	Penanganan tanggap darurat bencana	Rp.	552.282.500
169	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp.	15.000.000
170	Peningkatan sarana dan prasarana	Rp.	64.055.200
171	pendidikan politik masyarakat	Rp.	53.472.000
172	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Rp.	200.000.000
173	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rp.	25.428.750
174	Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	2.634.264.000
175	Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Rp.	65.256.000
176	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp.	66.939.500
177	Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp.	17.150.000
178	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	3.102.820.000
179	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rp.	16.427.100.000
180	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Rp.	33.985.000.000
	TOTAL	Rp.	440.614.607.544

Pulau Punjung,

2019

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,01	71,10	100,13	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat						
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,48	8,46	99,76	Sangat Berhasil
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,90	12,42	96,28	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya ketahanan pangan						
1	persentase Ketersediaan Kalori dan Protein per kapita	%	78,6	130,8	166,4	Cukup Berhasil
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak						
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,53	88,30	98,63	Sangat Berhasil
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	49,65	50,00	100,71	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	55,65	49,64	89,20	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya kualitas perumahan						
1	Rasio rumah layak huni	%	88,5	92,0	104,0	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak						
1	Akses air minum layak	%	22,7	19,7	86,6	Sangat Berhasil
2	Akses Sanitasi Layak	%	40,6	69,6	171,4	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 8 Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB						
1	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	29,25	29,25	100	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 9 Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat						
1	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	20	25	125,0	Sangat Berhasil
2	Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Unit	30	34	113,3	Sangat Berhasil
3	Persentase IKM dengan peningkatan Omset	Persen	5,7	6,62	116,1	Sangat Berhasil
4	Persentase Pasar dalam kondisi baik	Persen	25	27	108,0	Sangat Berhasil

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Sasaran Strategis 10 Menurunnya Tingkat Kemiskinan						
1	Persentase penduduk miskin	%	6,17	6,29	98,06	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 11 Meningkatnya kualitas mutu air, udara dan tutupan lahan						
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	69	42	61	Berhasil
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86	86	100	Sangat Berhasil
3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	51	43	85	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 12 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan						
1	Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)	%	90	102,8	114	Sangat Berhasil
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 13 Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan						
1	Hasil evaluasi AKIP	Predikat/ nilai	B	B	100,0	sangat berhasil
2	Nilai LPPD	Predikat/ nilai	3,275	3,4404	105,1	sangat berhasil
Sasaran Strategis 14 Meningkatkan status pembangunan nagari						
1	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	%	19,23	23,07	80,03	Berhasil
Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah						
1	Jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30	30	100	Sangat Berhasil
2	Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
3	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan DITETAPKAN	Unit	11	11	100	Sangat Berhasil

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTANA RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

PENGHARGAAN/PIAGAM

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Tahun 2018 dan 2019



Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kepada Kabupaten Dharmasraya



Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2018 dari
Kementerian Perdagangan



Obsession Awards 2018 sebagai Best Achiever In Regional Leader



Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2018

Dari Kementerian Lingkungan Hidup



PENGHARGAAN

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2019

Kepada

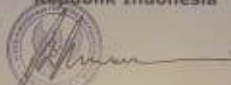
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Kategori

PRATAMA

Makassar, 23 Juli 2019

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia



Yohana Yembise

PRATAMA
KABUPATEN DHARMASRAYA
2019



Diagram Penghargaan
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menganugerahkan

Tanda Penghargaan
Alanggala Karya Kentana

Kepada

Nama : *Dewi Lopita Sari, S.ST*

Jabatan : *Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat*

Sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nomor : 15/KEP/G2/2019

Tanggal : 2 Juli 2019

Penghargaan atas prestasi yang menonjol dan komitmen serta kepemimpinannya dalam menggerakkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Jakarta, 2 Juli 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



Hasto Wardoyo
Hasto Wardoyo



Sertifikat

Diberikan Kepada

KABUPATEN DHARMASRAYA

Sebagai

**HARAPAN 1 GENRECYCLE
GENRE FELLOWSHIP GOES TO 5GE**

TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

#REMAJAUNGGULSUMBARHEBAT

Padang Panjang, 15 - 18 Oktober 2019

Padang Panjang, 18 Oktober 2019
Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Barat,



H. Syahrudin, SH, M.Si
NIP. 19600511 198603 1 002



Sertifikat

Diberikan Kepada

KABUPATEN DHARMASRAYA

Sebagai

JUARA 2 DA'I GENRE

GENRE FELLOWSHIP GOES TO 5GE

TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

#REMAJAUNGGULSUMBARHEBAT

Padang Panjang, 15 - 18 Oktober 2019

Padang Panjang, 18 Oktober 2019

Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Barat,



H. Syahrudin, SH,M.Si
NIP. 19600511 198603 1 002



Sertifikat

Diberikan Kepada

KABUPATEN DHARMASRAYA

Sebagai

JUARA 3 STAND UP COMEDY

GENRE FELLOWSHIP GOES TO 5GE

TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

#REMAJAUNGGULSUMBARHEBAT

Padang Panjang, 15 - 18 Oktober 2019

Padang Panjang, 18 Oktober 2019

Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Barat,

H. Syahrudin, SH,M.Si

NIP. 19600511 198603 1 002





Piagam Penghargaan

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

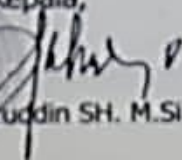
Diberikan Kepada :

Kabupaten Dharmasraya
Harapan I (Satu)

Gelar Dagang Produk UPPKS Dalam Rangka
Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXVI
Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 di Padang Panjang

Padang, Juli 2019

Kepala,


H. Syafrudin SH. M.Si



Juara II
LOMBA MASAK
SERBA IKAN
MENU KUDAPAN
TINGKAT PROV. SUMATERA BARAT
TAHUN 2019

JUARA II
LOMBA MASAK
SERBA IKAN
MENU KUDAPAN
TINGKAT PROV. SUMATERA BARAT
TAHUN 2019



JUARA HARAPAN 2

Kategori Menu Balita
Lomba Masak Tingkat Nasional XVII
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jakarta, 14 Desember 2019





Peringkat 2 penghargaan
Keterbukaan Informasi Publik
tingkat Provinsi Sumatera Barat



DINAS PANGAN DAN TIM PENGGERAK PKK

Provinsi Sumatera Barat



Piagam

Nomor : 521/Ist-400/Pangan-2019

Diberikan kepada :

TP. PKK Kab. Dharmasraya

Harapan II

pada Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang diadakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang pada tanggal 29 November 2019

Padang, 1 Desember 2019

Ketua Tim Penggerak PKK
Provinsi Sumatera Barat



Ny. Nevi Irwan Prayitno

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sumatera Barat



Ir. Efendi, MP
NIP. 19630515 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PANGAN



PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA :

DINAS PANGAN & PERIKANAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Sebagai :

PERINGKAT II

"PADA LOMBA PENGELOHAN PANGAN LOKAL TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019"

Diselenggarakan Pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Ke- 39
Tingkat Provinsi Sumatera Barat Oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
di Padang Pada Hari Sabtu Tanggal, 30 November 2019

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Ir. FEENDI, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006

WTP LKPD TAHUN 2019



PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI DENGAN PERLINDUNGAN HAM DARI KEMKUMHAM



PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN PERTANIAN KEPADA
BUPATI DHARMASRAYA

